



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM RI**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.15 s.d. 13.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I DPR RI,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : M. Sarmuji, SE., M.Si
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PG)
- Acara : Pembahasan mengenai :
1. RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2025;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan
Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
25 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**

7 orang Anggota dari 12 Anggota:

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Rieke Diah Pitaloka
3. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
4. Sonny T. Danaparamita
5. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
6. Sondang Tiar Debora Tampubolon
7. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-PG)**

5 orang Anggota dari 8 Anggota:

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.

3. Ir. H. Mohammad Idris Laena
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
5. Drs. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)

6 orang Anggota dari 8 Anggota:

1. H.M. Husni, S.E., M.M.
2. Khilmi
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
4. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.
5. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)

2 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 orang Anggota dari 5 Anggota:

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

0 orang Anggota dari 5 Anggota:

-

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Amin Ak, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 orang Anggota dari 2 Anggota:

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Menteri Investasi RI (Bahlil Lahadalia, SE.,

M.Sc.) beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,*

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat dan selamat datang kepada Menteri Investasi Kepala
BKPM RI, Bapak Bahlil Lahadalia beserta seluruh jajaran,**

Puji syukur marilah kita *haturkan* ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Mahakuasa, atas limpahan rahmat, karunia, nikmat-Nya pada hari ini, kita bisa mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Menurut laporan dari sekretariat, ini belum kuorum, Pak Menteri. Karena sesuai dengan tata tertib, kalau belum kuorum kita tunda sejenak untuk memenuhi kuorum, biar proses pengambilan keputusan kita nanti menjadi absah.

Saya tunda, berapa menit, Pak Harris, kita tunda sebentar, Pak Harris? Pak Harris, kita tunda berapa menit? Lima menit? Sampai rekan-rekan datang?

Saya buka terlebih dahulu, rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.51 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Dan saya *skorsing* 5 menit.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 10.51)

(SKORS DICABUT PUKUL 10:56)

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI atas kesediaan waktunya untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini adalah pembahasan mengenai:

1. Pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025;



2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024;
3. Lain-lain.

Untuk itu kami juga minta persetujuan, rapat kita sampai jam berapa? Kalau 12 cukup, nanti pertanyaan jangan panjang-panjang. Dua belas cukup, sampai jam 12. Pak Harris? Sampai jam berapa, Pak Harris? Ya sementara sampai jam 12.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan,

Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Dan Anggaran merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah yang disusun setiap tahun berdasarkan pagu indikatif pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar sasaran program pembangunan pemerintah tersebut dapat diterjemahkan dan diimplementasikan oleh kementerian, badan, dan lembaga negara dengan baik melalui program kerja, proyek yang didukung dengan rencana anggaran yang dibutuhkan.

Pembahasan RKP dan RKA kementerian/lembaga diharapkan dapat disusun dengan mempertimbangkan kontinuitas, kebijakan, dan program sebelumnya dan program selanjutnya untuk dilaksanakan dengan optimal dengan kinerja yang makin meningkat.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.201/D dan seterusnya, tanggal 5 April 2024, dan hasil keputusan rapat dalam *konsinyering* dengan pejabat Kementerian Investasi/BKPM RI pada tanggal 6 Juni 2024, Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI ditetapkan sebesar Rp681.880.285.000,00, terdiri dari:

- a. Program Penanaman Modal sebesar Rp322.394.354.000,00;
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp359.485.931.000,00, serta;
- c. Usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI tahun 2025 sebesar Rp889.320.857.000,00.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI untuk dapat menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan.

Saya persilakan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,*



Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Dewan Komisi VI,
Bapak-Ibu semua yang mulia,**

Pertama, saya ucapkan terima kasih pimpinan atas waktunya. Yang kedua, karena sesuai dengan agenda rapat kita hari ini hanya ada pada dua, yaitu:

1. Evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi di 2023, kemudian
2. Kuartal pertama 2024, dan program 2025.

Saya izin menyampaikan kepada Pimpinan, bahwa mungkin saya tidak akan lebih panjang untuk menjelaskan, karena yang pertama adalah deputi saya semua sudah melakukan konsultasi dengan Bapak-Ibu Anggota Dewan Komisi VI. Tapi untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan kewajiban moralitas saya sebagai Menteri Investasi, maka izinkan saya untuk memaparkan *slide* nomor tiga, langsung.

Pimpinan,

Saya menjelaskan tentang ini adalah realisasi investasi sejak masa pemerintahan Pak Jokowi di 2015 sampai dengan 2023. Itu memang *alhamdulillah*, sejak kami masuk di 2019 sampai dengan sekarang, target RKP dan target realisasi kita lebih tinggi realisasi, karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden.

Bahkan di tahun 2023, di mana RKP kita hanya 1.099,8 triliun, tapi perintah Bapak Presiden Jokowi memerintahkan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, maka investasi kita harus 1.400 triliun. Namun, kita mampu merealisasikan sebesar Rp1.417 triliun. Itu untuk realisasi kita di 2023, Pimpinan. Dan itu juga terjaga dengan investasi yang berkualitas antara Jawa dan luar Jawa, kita masih lebih baik di luar Jawa, lebih banyak. Kemudian PMA, PMDN, kita juga PMA kita 52%.

Nah, untuk kuartal pertama di 2024, Pimpinan, saya ingin menyampaikan, bahwa dari target kita 1.650 triliun padahal RKP kita sebesar 1.000, RKP kita itu 1.239 triliun, tapi diberikan target oleh Bapak Presiden 1.650 triliun. Dan *alhamdulillah* kita sudah mampu merealisasikan sebesar 401,5 triliun pada kuartal pertama dengan total akumulasi 24,3% dengan penciptaan lapangan pekerjaan 547.419 orang. Pada tahun 2023, penciptaan lapangan pekerjaan kami kurang lebih sekitar 1.800.000 lebih sekian, dengan komposisi Jawa-Luar Jawa. Demikian.

Nah, dalam beberapa pertanyaan kemarin, saya ingin memberikan satu *slide* terhadap apa *sih* kontribusi investasi terhadap *Gini Ratio*. Jadi, pimpinan, kalau kita lihat, *semakin* tingginya pertumbuhan investasi, itu terjadi



penurunan terhadap *Gini Ratio*. Ini ada beberapa pertanyaan kemarin yang waktu kita rapat kerja, kemudian saya ingin menampilkan itu saja.

Pimpinan, saya juga sampaikan bahwa semua target investasi itu terjadi karena didukung oleh anggaran yang memadai. Karena kalau kita masuk pada prospek, saya akan masuk ke anggaran 2025.

Coba *slide* 6 ya.

Kemudian anggaran kita 2024, Pimpinan, sebesar 1 triliun 229 miliar, sudah realisasi kurang lebih sekitar 43%, Pimpinan. Jadi, *alhamdulillah* udah berjalan baik.

Nah, sekarang kita masuk babak, babak baru, Pimpinan, tentang program 2024, 2025. Pimpinan, saya kebetulan sama Pimpinan ini kan pernah kita sama-sama di satu organisasi dan melakukan perdebatan tentang bagaimana diskursus tentang sebuah pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan program dan anggaran.

Dalam berbagai kesempatan, kalau kita bicara tentang rumus pertumbuhan ekonomi kita, itu *kan* konsumsi plus investasi, ekspor-impor, dan *spending government* (pemerintah). Kalau kita mengikuti pidato-pidato pimpinan negara kita maupun pemaparan dari para Bappenas, nanti Prof Haris tolong luruskan kalau saya salah, maupun dari Kementerian Keuangan, dengan kondisi Global yang tidak menentu, konsumsi yang tidak bisa kita pacu, maka harus kita dorong adalah ekspor-impor, daya beli masyarakat, dan Investasi.

Artinya, hulunya ini adalah investasi. Dan oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, termasuk ketua umumnya Pak Ketua, Pak Sarmuji, yang notabenehnya Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa esensi subs, *eh*, penting dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di 2025 di atas 5% itu harus investasi. Namun, apa yang terjadi? Saya tidak tahu ada teori ekonomi baru atau apa, Pak Haris ini kan orang akademisi ekonomi, ya. Jadi, dalam, kalau saya sekolah di kampung dulu, antara kebijakan, antara target dan kebijakan itu harus inheren, harus ada benang merah.

RKP kita di tahun 2025 itu 1.850 triliun sampai dengan 1.900 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, sebagai salah satu syarat. Dan itu untuk mendorong ekspor-impor, produk hilirisasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, karena penciptaan lapangan pekerjaan kualitas itu salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau hanya upah UMR, bagus juga dalam rangka padat karya, tapi kita akan mendorong untuk pertumbuhannya itu lebih baik, lebih berkualitas.

Namun, apa yang terjadi, Pimpinan? Saya tidak bermaksud untuk mengeluh, *enggak*. Saya hanya memberikan satu diskursus untuk kita, kalau tanggung jawabnya dinaikkan, idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran.



Saya pikir itu di kampus mana pun, di sekolah mana pun, karena beda dengan membangun gedung, beda dengan membangun jalan, beda dengan membangun jembatan. Kalau membangun gedung, membangun jembatan, membangun jalan, enggak ada uangnya, enggak usah dibangun. Kalau RKP itu bicara angka nominal, dan ini akan *mempengaruhi* tentang proses pertumbuhan ekonomi nasional kita 2025.

Apa yang terjadi, Pimpinan? Kalau kita lihat pada basis anggaran kita, pada, coba lihat di *slide* nomor, *sorry*, Pimpinan, *slide* nomor 6. Coba lihat *slide* nomor 6, itu beban, beban target investasi naik, tapi *dibarengi* dengan kenaikan anggaran, *gitu loh*.

Nah, ini tahun 2025, saya baru menemukan teori ekonomi *kayak* begini. Ini kita belajar semua ini karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini, karena belum saya menemukan teorinya. Kalau memang Pimpinan dan seluruh Bapak-Ibu Anggota DPR punya teori baru, tolong *ajarin* saya.

Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun, anggarannya diturunkan? Dari target 1.400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih, sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya, sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, dan pernah menjadi Ketua Umum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini, dan saya minta kepada Pimpinan, tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas, menjelaskan ini.

Nah, karena itu, dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP, saya koreksi menjadi 800 miliar. Jadi, saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini, RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan, 1.850 triliun itu tidak inheren bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. *Gak* apa-apa, biar media tahu. Jadi, saya menyarankan kepada Pimpinan lewat rapat yang terhormat, karena Bapak-Bapak mewakili rakyat, kita revisi *aja* RKP-nya dari 1.850 triliun menjadi 800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya.

Jadi, saya mohon maaf, saya tidak mau juga menjadikan staf saya ini jadi kambing hitam. Besok nanti kalian rapat, kemudian Anggota DPR yang terhormat ini *nanya* kepada mereka, dikasih beban, *enggak* dikasih fasilitas. Kalau saya kan, *insyaallah* kalau umur panjang, sampai Oktober selesai, tapi mereka *kan*, dilanjutkan, *gitu kan*, *gitu loh*. Jadi, saya tidak *pengen* meninggalkan *legacy* yang kurang bagus untuk tim saya, *gitu loh*.

Jadi, dan ini bisa menjadikan sebagai *notulensi*. Begitu ada rapat nanti, pasca 2024, 2025 kalian meminta pertanggungjawaban kepada tim saya, jangan meminta 1.850 triliun untuk realisasi investasi. Jadi, 800 triliun *aja*, Pimpinan. Ya terserahlah, *gitu*, dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan. Tapi, kalau Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru, tolong *ajarin* kami, biar kami bisa menyesuaikan, *gitu*.



Yang kedua, Pimpinan, saya pikir *enggak* ada lagi program yang perlu kita bahas, hanya itu saja. Apa yang mau dibahas? Dan 650 triliun ini, ini kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta, anggarannya lebih besar daripada kementerian ini.

Dan kalau boleh, Pimpinan, kalau begini terus ya, rapatnya cukup satu tahun satu kali saja lah. Apa yang kita mau evaluasi kalau model *kayak* begini? Saya pikir itu *aja*, Pimpinan, supaya rapatnya bisa cepat selesai.

Terima kasih.

Kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabilahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,*

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri.

Saya sedikit saja mengomentari paparan Pak Menteri. Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar, mestinya intonasi tinggi ini di Rapat Kabinet, nah, itu baru cocok, *gitu*. Kalau di sini *kan* kita mau apa juga selain menyetujui.

Baik, untuk melakukan pendalaman sudah hadir dan sudah meminta waktu untuk melakukan pendalaman.

Pak Demer lebih dahulu. Kalau konsisten jam 12, harus pendek-pendek, Pak Demer. Kata Pak Bahlil, apalagi mau panjang-panjang, katanya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Pimpinan, saran kami, kita bahas yang ada saja, supaya 650 triliun kalau kita setuju, kita setuju saja, tidak apa-apa juga, supaya tidak ada banyak pertanyaan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya. Ya biar, biar juga ditambahkan keluhan-keluhan Pak Menteri tadi oleh Pak Demer ini.

Silakan, Pak Demer.



F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Iya.

Yang terhormat rekan-rekan Komisi VI terutamanya yang hadir pada hari ini,

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya pula,

Di mana Pak Menteri ini kelihatannya curhatnya agak dalam tadi itu, Pak Ketua, ya sampai ilmu pertumbuhan ekonomi juga dibahas, *gitu*, implikasinya juga, *gitu*, karena *saking* mengenaskan, mengenaskan turunnya 50% itu. Ini memang, kebetulan saya tamat ekonomi, jadi memang menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi.

Instrumen daripada pertumbuhan *government spending*, kita tidak bisa lebih, defisit kita dari 3%, *gitu*, aturan undang-undang, Pak, jadi enggak boleh lagi, Pak. Mau kita tingkatkan *segi mana*, ya mentok-mentoknya yaitu defisitnya 3% maksimum.

Jadi, kalau kita bicara, apa, ekspor-impor ya bagaimana, *enggak* ada yang investasi, industri tidak maju. Kemudian, kita berharap ekspor kita meningkat, ya *kan*. Kalau ekspor-impor dan industri, investasi tidak maju, tidak ada kenaikan, berarti konsumsi masyarakat rendah, *kan* itu? Jadi, sama dengan pertumbuhan rendah, ya, itu kira-kira ilmu, *udah* agak lama *nih* ilmu ekonomi. Sudah lama saya tamat di ekonomi, jadi kira-kira begitulah. Nanti Pak Haris lebih banyak tahu mungkin, dan saya berharap juga nanti Pak Haris, ada ilmu-ilmu baru seperti itu yang bisa kita pelajari nanti ke depan. Mungkin ada instrumen lain mungkin yang bisa, *gitu*, apakah instrumen doa barangkali dari Pak Amin nanti, kita *enggak* tahu juga, *gitu*, termasuk untuk meningkatkan pertumbuhan kita.

Yang paling prinsip dari saya adalah sebenarnya berjalannya, walaupun anggarannya kecil, saya berharap berjalannya program-program pemerintah, terutamanya di bidang OSS, itu berjalan dengan baik, ya.

Mungkin ini yang akan menjadi, apa, walaupun nanti turun investasinya di, tapi kemudahan bekerjanya juga menjadi sorotan penting untuk anggaran kita ke depan. Dan ya, agak berat memang, yang biasanya kalau kita di, apa, di rumah tangga, *gitu*, biasanya pengeluarannya 10 juta, *gitu*, tiba-tiba pengeluaran 5 juta *tuh*, *waduh*, berat itu, yang mana mesti dikencangkan itu ikat pinggangnya.

Itu barangkali, saya enggak banyak berkomentar karena pada hari ini adalah undangannya adalah rapat anggaran. Dan kebetulan, anggaran ini sudah di *konsinyering* kemarin, Pak Menteri, dengan teman-teman dibahas, apa, detailnya oleh teman-teman, dikomentari juga oleh teman-teman, waktunya juga cukup panjang kemarin di, waktu dikomentari di *konsinyering*. Saya rasa di sini juga saya enggak punya berkomentar banyak, dan ikut prihatin *aja* atas curhat yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi.

Mudah-mudahan nanti teman-teman perlu didengar juga, Pak, karena ada teori baru, terutama Pak Haris sama Pak Amin itu di belakang.

Makasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Demer.

Silakan Ibu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA)

Terima kasih.

**Pimpinan, dan
Anggota Dewan Komisi VI,
Yang kami hormati Pak Menteri bersama jajaran,**

Terima kasih *curhatnya*, Pak Menteri. Tentu jadi perhatian buat kami semua. kami pun juga prihatin, memang yang kita tahu untuk pertumbuhan ekonomi negara kita memang harus investasi *nih*, Pak Menteri, ya. Bagaimanapun, target investasi juga kita sesuaikan. Mudah-mudahan nanti, Pak Menteri, dengan adanya rapat ini, anggaran Pak Menteri bisa bertambah. Amin.

Pak Menteri, bagaimanapun kami juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui, Pak Menteri, ialah pencapaian Pak Menteri selama ini bekerja sama dengan UMKM, tentu memberikan dampak kepada UMKM. Dan bagaimana perkembangannya, Pak Menteri, selama ini UMKM dengan OSS yang sudah Pak Menteri lakukan selama 5 tahun? Target yang dicapai berapa, Pak Menteri? Ya ini perlu kami *ketahui* di akhir pemerintahan Pak Menteri.

Lalu yang kedua, yaitu mengapa, Pak Menteri, investasi yang dicapai selama ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Mengingat capaian investasi yang masuk ke dalam negeri ternyata tak membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh kencang, Pak Menteri, tapi terus-menerus stagnan di level 5%, ini terjadi sejak tahun 2014 sampai 2023. Selain itu, banyak investor yang masuk ke Indonesia membawa miliaran dolar Amerika seperti Lotte Chemical, Hyundai motor, dan lain sebagainya, tapi semua mereka padat modal, bukan padat karya.

Dan kita, tentu kita juga pada tahun 2025 nanti, apakah pemerintah akan fokus pada investasi padat karya atau padat modal? Kami berharap pemerintah dapat mengembangkan investasi padat karya, mengingat pengangguran kita sekarang banyak sekali, Pak Menteri, bertambah. Kita tahu, rahasia umum, Gen Z kita sudah menganggur 10 juta orang, ya. Agar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri dengan maksimal.



Terima kasih, Pak Menteri.

Itu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Bu Nevi.

Dari sebelah kanan kembali, Pak Jon Erizal.

F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan, dan
Teman-Teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri,
Pak Sekjen, dan
Semua yang mendampingi,**

Tadi terlambat, saya tidak mendengar keluh kesah Pak Menteri, tapi batinnya sudah ada di, di hati saya, jadi agak dalam kami membahas sama Sekjen ya, kemarin. Jadi poinnya, kalau enggak salah dulu saya pernah mengusulkan, sebelum itu disampaikan ke Menteri Keuangan, kita duduk *bareng* dulu dalam grup yang kecil sebenarnya, tapi itu mungkin karena kesibukan sama-sama ya, enggak berhasil.

Sehingga kalau itu sudah kita bahas bersama lebih awal, diskusikan, kemudian dengan target-target yang jelas, tentu kami bisa juga berkomunikasi dengan kawan-kawan di Komisi XI yang akan mengawal di Kementerian Keuangan. Bila perlu kita bikin *joint session*, tapi karena itu sudah lewat, nah memang kita prihatin ada penurunan yang apa, yang besar sekali di setiap kementerian.

Nah, ini *image* di *market* itu kurang bagus, Pak Menteri, apalagi *market* yang berkaitan dengan investasi. Ini orang, *wah* ini *kok* seperti ini tiba-tiba turun, walaupun secara tidak resmi dengar bisik-bisik bahwa itu ada kaitannya untuk dialokasikan pada pemerintah yang ke depan, katanya. Itu kan masih belum jelas juga. Kalau itu enggak seperti itu, nanti akan seperti apa nanti, *kan*. Ini yang penting bagi investor, Pak Menteri juga lebih tahu sekarang, itu adalah kepastian. Kalau sesuatu yang tidak pasti itu, semua orang akan ragu. Nah, itu satu.

Tentu kita berharap ada penyesuaian anggaran untuk target di Kementerian BKPM ini, tentunya bisa diloloskanlah oleh Kementerian Keuangan. Karena apa? Karena yang ada di Komisi VI ini, Pak Menteri, itu yang urusan cari *piti*, urusan penerimaan, betul kan, Pak Menteri? BUMN penerimaan negara, perdagangan juga ekspor *kan*, investasi yang masuk juga, ini semua menjaga pertumbuhan ekonomi, *gitu*.



Belanja penting memang, walaupun porsi nya tidak sebesar dari konsumsi masyarakat. Nah, cuman saya ingin sedikit menyampaikan, kalau anggaran, kita sangat peduli untuk ditingkatkan, itu poinnya. Jadi soal angka-angka, silakan nanti Pak Sekjen mengusulkan hal revisi seperti apa, *insyaallah* saya dari PAN pasti setuju itu.

Nah, kemudian yang saya ingin kita menjadi pikiran kita bersama, Pak Menteri, 2025 ini, saya *kok* punya *feeling*, Pak Menteri tetap, *feeling* yah, mudah-mudahan tetap ya. Nah, kalau tetap, ini ke depan ini *kan* kita banyak persoalan nanti akan muncul *nih*, Pak. Sebenarnya bukan akan muncul, sudah muncul dari sekarang.

Pertama, pajak kita *kan* naik 12%. Kedua, ada nanti indikasi sampai akhir tahun, mungkin *Federal Reserve* tidak akan menurunkan suku bunga. Ini akan meningkatkan tingkat suku bunga di lokal, ini beban. Nah, ketiga, ada lagi Tapera ini, itu juga beban, sehingga nanti daya beli menurun. Daya beli lokal yang harusnya kita perkuat, itu nanti menurun. Nah, kalau ini menurun, investor *kan* akan terganggu. Investor akan terganggu, target yang luar biasa selama berapa tahun ini tercapai dengan maksimal, nah ini perlu diantisipasi itu.

Saya sangat berpikir ini seperti apa terobosan yang harus kita lakukan bersama. Mungkin kita perlu teruskan mengadakan mungkin FGD, kalau saran saya, lebih leluasa untuk berdiskusi. Kira-kira nanti saya yakin juga teman-teman punya ide-ide yang baik, digabung dengan ide Pak Menteri dan tim, saya yakin kita bisa *ngatasi* ini dengan maksimal.

Jadi mudah-mudahan apa tadi, penurunan anggaran tadi itu hanya sifatnya *temporary*, itu bisa digunakan nanti pada waktunya. Nah, harapan kita tentu demikian, tentu akan lebih longgar lagi Pak Menteri *ngatur* strategi.

Bahkan saya berpikir, harusnya itu di *plotting aja*, kalau pada saatnya perlu direvisi, *kan* tinggal direvisi, *gitu*, jadi sudah jelas *nih* anggaran sebesar sekian, *gitu*. Bagaimana kita membuat asumsi makro dengan pertumbuhan ekonomi 5,5 atau 5,6%, tapi dengan belanja yang banyak dikurangi, *gitu loh*. Ini *kan* enggak *balance*, *enggak balance* dan membuat ketidakpastian di antara para pelaku ekonomi.

Jadi itu saja, Pak Menteri, mudah-mudahan kita siap terus bersama.

Demikian.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,



Terima kasih, Pak Jon Erizal.

Pak Husni, silakan.

F-P. GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan
Teman-teman Komisi VI,
Yang saya hormati Bapak Menteri dan seluruh jajarannya,**

Pertama, Pak Menteri, saya ini seorang pedagang jadi anggota DPR, Pak Menteri seorang pengusaha sekarang jadi menteri. Orang bilang kalau mau kaya ya jadi pengusaha, di DPR kita mengabdikan, *insyaallah* Pak Menteri juga menjadi seorang menteri mengabdikan untuk Republik Indonesia ini.

Ini ya, Pak Menteri, masalah program anggaran ya, kita ini tidak ada masalah karena kita tahu investasi penanaman modal itu tentunya itu memberikan harapan untuk peningkatan devisa negara dan juga adalah untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan kita 270 juta penduduk.

Jadi, sedikit *nih*, Pak Menteri, saya kemarin waktu kita rapat dengan Menteri BUMN itu lagi dibuka lapangan kerja di BUMN. Yang *ngelamar*, Pak Menteri, terenyuh saya, ada 2 juta pelamar yang diterima lebih kurang mungkin 40 ribu orang, itu kira-kira 2% ya. Tetapi kita juga melihat ya, karena apa pun cerita investasi, cerita masalah uang, cerita masalah keuntungan, itu tidak ada matanya, apakah itu negara A, negara B, negara C, di mana pun tempat-tempat menguntungkan, orang akan datang melakukan investasi. Ya, saya pikir negara kita ini sangat amat menarik ya. Ya, penduduknya banyak, kemudian *resources*-nya ada, upahnya juga masih jauh lebih murah, dan lain sebagainya.

Ada satu hal yang ingin saya, ya boleh bilang tadi Pak Menteri *bercurhat nih*, saya sedikit *bercurhat juga lah*. Saya *dulu* importir, Pak Menteri, saya importir dari China, masukkan produk-produknya ke negeri kita. Sejak apa, Covid, saya sudah stop, saya sudah menjadi anggota dewan. Orang bilang ya, Pak Jokowi juga selalu mengatakan, Pak Menteri juga mengatakan, waktu ada perang dagang antara China, antara Amerika, ya, mestinya kita mengambil keuntungan dari perang dagang tersebut. Ya pasti mereka melakukan investasi, mereka melakukan hal-hal yang menguntungkan untuk kita, negara kita. Ini salah satu contoh ya.

Ya kemarin, tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni, ada pameran itu produk-produk Cina di, apa itu namanya, Kemayoran ya, ya kemarin ya. Dan setahu saya, sekarang ada mungkin 20 ribuan perusahaan di sana, yang biasanya bisa melakukan penjualan langsung ke negara Eropa maupun Amerika, hari



ini mereka tidak bisa melakukan apa pun, yaitu di Yiwu, di Xuexiang, dan lain sebagainya.

Malah saya mendapat kabar, mereka ingin melakukan yang namanya investasi barang setengah jadi itu, Pak Menteri, kita paham itu *kan* ya. Jadi, barang itu setengah jadi, keluarlah, kita bisa jual ke Eropa, ke Amerika, dan lain sebagainya, dengan catat, dengan ya yang dikatakan itu *made in* Indonesia karena keluar dari rahimnya Republik Indonesia.

Tentunya ini bisa memberikan tenaga kerja, pendapatan devisa. Mungkin dengan aturan-aturan bahwa barang produk tersebut tidak boleh ada di dalam, tidak boleh dijual di dalam negeri ya.

Jadi tolong ini, Pak Menteri ya, ya namanya *curhat-curhatan* ya, saya cuma memberikan hal-hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan di ujung kepemimpinan Pak Menteri ini tentu ada sebuah *legacy* yang bisa, banyak menguntungkan, daripada pengusaha-pengusaha kita di Republik Indonesia ini sendiri.

Apalagi, Pak Menteri, saya kemarin dari Menteri Koperasi ada mendengar cerita, kemarin ya, dalam rapat seperti ini juga, akan ada penjualan-penjualan produk-produk asing yang bisa *direct* masuk ke, ke, ke, apa, ke negara kita, tanpa banyak proteksi dan lain sebagainya. Dan ini sudah pasti, ini akan merusak dan menggerus investasi kita di dalam negeri, karena kita bisa tahu yang di-*protect* aja, yang barang-barang impor di-*protect* aja, sekarang mereka masih bisa *survive* di Republik kita, apalagi, apalagi kalau tidak ada proteksi dan lain sebagainya.

Jadi, ya mudah-mudahan ini juga bagian *curhat* saya. Saya juga seorang pengusaha ke Pak Menteri, Pak Menteri Investasi, mudah-mudahan ini juga adalah bagian daripada kemajuan kita Republik Indonesia, karena kita adalah anak bangsa di sini.

Terima kasih, Pak Menteri.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wabillahi taufik wal hiidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Husni.

Kemudian, Pak Harris Turino, mau menyampaikan teori baru katanya.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):



Baik terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM,
beserta seluruh jajarannya,**

Saya koreksi sedikit mengenai agenda rapat, Pak, mohon dibaca ulang bahwa agenda rapatnya adalah RKP dan RKA K/L 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran 2023 dan semester I 2024 dan poin yang ke tiga adalah lain-lain. Jadi ada poin yang lain-lainnya, sehingga komentarnya agar tidak dibatasi, Pak, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak, ini menarik tadi *curhatan* Pak Menteri. Pak Menteri memaparkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dibutuhkan minimum e-investasi sebesar 1.800-1.900 triliun. Dan anggaran, ternyata anggaran Kementerian Investasi yang tadinya 1,2 dipotong separuh, tinggal 681.

Nah, saya sepakat dengan Ketua, bahwa ini *curhat* di tempat yang tidak pas ya, karena seharusnya *curhat* ini adalah disampaikan di dalam rapat kabinet. Ide untuk mengurangi anggaran dari 1,2 triliun menjadi hanya 681, apakah ini ide presiden sekarang atau ide presiden terpilih? Pasti ada alasannya, kenapa ini dikurangi sedemikian besar. Apakah pengurangan ini akan dilakukan karena ada *reserve* untuk program-program lain yang dianggap lebih penting? Nah, ini siapa yang dominan? Apakah memang presiden sekarang atau presiden terpilih? Ini rasanya *kudu* diangkat, Pak, ya. Walaupun kalau *ngangkat* ini bahaya, Pak, bisa keluar nama Bapak, Pak. Ini yang kedua, Pak.

Dan saya sepakat, Pak, secara logis, seharusnya anggaran Kementerian Investasi dinaikkan supaya investasi akan datang lebih banyak. Tetapi, harus disadari, Pak, bahwa korelasi antara besaran anggaran Kementerian Investasi tidak linier dengan besaran investasi yang masuk.

Ekstrem saja, Kementerian Investasi dibubarkan, saya yakin tetap ada investasi asing yang masuk, karena daya tarik republik ini memang sangat besar. Tetapi, seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Investasi, kalau tidak ada kestabilan politik, tidak ada kepastian hukum, dan korupsi merajalela, ekonomi biaya tinggi, maka usaha Bapak akan sia-sia, Pak.

Sehingga korelasinya tidak selalu seperti itu. Termasuk juga keberhasilan mendatangkan 1.400 triliun investasi, juga tidak semata-mata diklaim karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia, tetapi adalah kerja sama dari semua pihak, dari aparat keamanan, dari DPR, dan dari pihak-pihak lain di dalam menciptakan iklim investasi yang pas.

Kemudian, ini ada hal menarik, Pak, waktu Ibu Sri Mulyani membacakan mengenai pagu indikatif di dalam Sidang Paripurna ya. Beliau



memaparkan bahwa untuk mencapai kondisi Indonesia Emas 2045, maka dibutuhkan per *capita income* Indonesia di level 33.000 US Dollar, karena batas margin negara kaya di 2045 adalah di 30.000 US Dollar. Nah, dari angka ini, maka berapa persen pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan? Saya bikin ekstrapolasi, ketemu minimal 8 sampai 9% baru mencapai angka 33.000 US Dollar dalam 2045.

Faktanya, pemerintah hanya *mentargetkan* tahun depan 5,2, sehingga apakah saya boleh menyimpulkan bahwa termasuk penyelenggara negara, Indonesia Emas ini adalah satu mimpi, Pak? Karena tumbuhnya hanya 5,2 sehingga angka 33.000 tidak akan tercapai. Apalagi ditambah masih ada 22% bayi yang *stunting* dan bayi ini 2045 akan masuk ke usia kerja produktif dan mereka akan mengisi sebagai tenaga kerja di Indonesia, ya.

Berikutnya, Pak, mengenai lain-lainnya, Pak Menteri. Beberapa rapat kerja sebelumnya termasuk dua rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi, akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN, ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang, tidak ada satu pun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN.

Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa *ground breaking* yang berhenti hanya pada tahap *ground breaking*, sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan, itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak.

Nah, kalau 16 triliun, melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta apalagi asing akan sulit sekali untuk menaruh dananya kecuali "diinjak", Pak, kalau "diinjak", mau *ndak* mau ya harus ke sana. Tetapi, apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar?

Berikutnya mengenai isu yang seksi juga, Pak, mengenai bagi-bagi izin tambang kepada institusi keagamaan maupun ormas. Saya mendengar berkali-kali, Pak Menteri memberikan penjelasan ya dan meyakinkan bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, saya juga membaca, ada menteri senior lain yang mengatakan bahwa yang namanya izin tambang tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi harus dibagikan melalui proses lelang.

Jadi mana yang benar, Pak? Apakah membagikan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah membagikan ini sesuai dengan rasa keadilan sosial? Dan apakah memang benar bahwa kepala satgas yang berhak untuk membagikan, bukan Menteri ESDM?



Dan ternyata ini juga menimbulkan polemik, Pak. Beberapa pihak baik di dalam NU sendiri juga menyatakan keberatannya. Ormas yang lain atau lembaga keagamaan yang lain, menyatakan juga keberatannya. Saya membaca satu *postingan* yang lucu sekali dari kalangan Kristen, "Yang kami *butuhkan* bukan izin tambang, yang kami *butuhkan* izin mendirikan gereja". Ini kan satu sinisme yang menyakitkan, Pak, ya.

Kemudian mengenai Rempang *Eco City*. Bagaimana kelanjutannya sekarang, Pak? Apakah permasalahan yang ada sudah diselesaikan? Apakah setiap warga negara yang memiliki hak di sana, masyarakat adat, sudah mendapatkan keadilan di Rempang *Eco City*? Dan mohon dielaborasi, Pak Menteri, siapa *sih* sebenarnya yang paling diuntungkan dari kasus Rempang?

Terakhir, mengenai Elon Musk ya. Ini kaitannya dengan Pak Menteri juga, karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam, bahkan baterai pun gagal masuk ke Indonesia, yang masuk adalah Starlink.

Masuk beroperasi, tidak memiliki NOC, ya, bahkan belum memiliki ULO (Uji Layak Operasi). Sudah diberi gelaran karpet merah, beroperasi di Indonesia dan jelas bahwa kalau nantinya mereka akan masuk ke skema *business to celluler*, maka bisa dipastikan bahwa 260.000 BTS Telkom dan 43.000 Tower Telkom maupun internet *provider* yang lain, akan mati.

Bagaimana tanggapan Menteri Investasi mengenai hal ini? Investasi yang masuk dan yang akan mematikan BUMN kita? Investasi yang masuk yang akan mematikan orang-orang yang sebelumnya sudah membangun di Indonesia. Mohon ada sedikit kepedulian, sehingga kepentingan Indonesia bisa didahulukan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Terima kasih, Pak Harris.

Silakan selanjutnya, Pak Hakim, setelah minum kopi dulu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Sarmuji, yang ke berapa *nih*, Pak? 35 ya? Jadi kemarin ternyata Pak Sarmuji ulang



tahun, Pak Bahlil. Hari ini atau kemarin *nih*? Oh *udah*. Pak Sarmuji *barusan* ulang tahun, Pak Menteri, Pimpinan kesayangan kita ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Bahlil, Menteri Investasi/Kepala BKPM beserta
seluruh jajaran,**

Ada tiga hal mungkin yang akan kami sampaikan di sini, Pak Bahlil. Yang pertama, berkaitan dengan anggaran, mungkin tadi sudah dibahas sama teman-teman, normatif saja saya memberikan semangat, Pak. Mudah-mudahan dengan anggaran yang terbatas itu, yang namanya Rambo, Pak, ya. Rambo itu *kan* siap bertempur di kondisi apa pun dan saya meyakini bisalah *insyaallah*, Pak, itu pertama.

Kemudian yang kedua, Pak. Jadi, selama beberapa tahun ini, rapat sama *panjenengan* ini *kan* kalau berbicara capaian atau realisasi investasi, yang disuguhkan data-data kuantitatif berkaitan dengan jumlah berapa yang masuk. Kemudian berapa serapan tenaga kerja, dan juga berapa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita.

Nah, mungkin, Pak, kami ingin mengusulkan, ditambahkan juga parameter yang di situ bisa mengukur capaiannya, mungkin kualitatif, Pak, bukan kuantitatif. Jadi, kualitatif, berkaitan dengan yang beberapa kali ini sering ramai, Pak. Satu, dampak sosial, kemudian yang kedua mungkin dampak terhadap masyarakat.

Jadi, sering kali ini *kan* timbul opini-opini minor tentang investasi yang masuk tidak ramah lingkungan, kemudian tidak ramah terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini saya rasa yang perlu menjadi perhatian khusus daripada Kementerian Investasi, supaya dapat menjelaskan kepada publik, oh ternyata ada *kok* parameter pengukuran secara kualitatif yang menjelaskan dampak sosialnya bagaimana, kemudian dampak kepada masyarakat seperti bagaimana.

Karena kalau kita berbicara, apa, trennya sekarang ini *kan* kalau yang sering kali muncul itu ESG, Pak ya, *Environment Social* sama *Governance*. Kalau *governance* mungkin di perusahaannya langsung, tapi kalau kita bicara sosial sama, apa, untuk lingkungannya, itu *kan* dari pemerintah bisa ikut mengatur juga bisa ikut mengawasi juga, Pak.

Jadi mohon, Pak, ini menjadi perhatian khusus untuk ditambahkan parameter berkaitan dengan dua poin ini, Pak, lingkungan dan juga masyarakat, agar supaya tidak timbul opini-opini minor. Karena kemarin sempat viral juga di Instagram, Pak, itu *all eyes on* Papua dan kemudian mungkin yang sebelumnya seperti Rempang dan lain-lain sebagainya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti berikut, tambahkan, Pak, parameter berkaitan dengan lingkungan dan juga sosial ini. Itu poin kedua.



Kemudian poin yang ketiga, Pak. Saya masih ingat, Bang Jon, Kapoksi, saya di *konsinyering* kemarin itu menyampaikan kepada deputi-deputi Bapak. Kalau memang ternyata dari Kementerian Investasi ini anggaran untuk tahun 2025 *segitu* kurang banyak atau mungkin tidak cukup, Pak. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran, kira-kira anggaran yang dibutuhkan berapa banyak? Dan kira-kira dari anggaran tersebut, bisa menarik investasi berapa besar?

Saya masih ingat, Kapoksi saya kemarin menyampaikan itu di *konsinyering*. Nah, *tapi* di paparan ini sepertinya belum ada juga, Pak Menteri, makanya saya di poin pertama tadi langsung memberikan semangat, oh berarti sepertinya cukup *nih*, ya *kan*, langsung *switch* ke mode Rambo sepertinya ini.

Jadi, mungkin nanti bisa dipaparkan selanjutnya, Pak Menteri, “Oh ternyata kita menargetkan sekian ribu triliun yang akan masuk dan kemudian angka-angka turunannya serapan tenaga kerja kemudian sebagainya, seperti *gini*, sehingga diperlukan anggaran sebegini besarnya”. Mungkin bisa dipaparkan juga itu. saya kira tiga poin itu.

Pak Menteri, saya *nitip* yang mungkin poin ke dua tadi, Pak, tambahkan parameter kualitatif berkaitan dengan lingkungan dan juga sosial.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Hakim.

Selanjutnya Pak Amin Ak.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan, dan

Teman-teman Anggota Komisi VI

Saya hormati Pak Menteri yang selalu ceria ya, apa pun yang dihadapinya ya,

dengan semua jajarannya yang saya hormati,



Ini bertanya setelah Pak Harris *nanya*, sudah dibawa semua oleh Pak Haris, sudah diborong. Jadi, yang dari bab lain-lainnya ini saya *nanya* tentang IKN, Pak, sama tadi, apa namanya, Mas Elon itu sebetulnya. Iya, karena sudah disampaikan Pak Harris, cuma pertanyaan saya, Pak, sampai saat ini, saya enggak mengatakan, apa ya, batal atau belum jadi ya, belum terealiasinya investasi Elon Musk, misalnya di IKN dan juga beberapa calon investor dari luar negeri yang dibilang kakap dan sudah banyak diberitakan di media itu. Itu *kan* menunjukkan ada sesuatu yang menurut saya sangat substansial, sangat mendasar. Tentu dari berbagai hal ya, tentu Pak Menteri bisa secara terbuka, kalau enggak terbuka, secara objektiflah menyampaikan hambatan-hambatannya apa.

Mungkin selain terkait dengan soal, apa namanya, perizinan, soal prosedur, soal macam-macam, juga terkait dengan prospek IKN itu sendiri. Dan juga apakah investor, calon investor dalam negeri yang juga sudah diberitakan di media itu dengan konsorsiumnya misalnya, itu juga mau ada realisasi atau nanti juga hanya ada di berita-berita saja, *gitu*. Saya enggak *nyebutkanlah*, saya kira kita semua *kan* sudah tahu. Itu pertanyaan saya.

Dan yang terakhir. *Kan* dari tim ekonominya kalau enggak salah ya, presiden terpilih hanya akan mengalokasikan 16T per tahun untuk IKN ya, kalau enggak salah begitu yang saya baca di media, sehingga butuh waktu 25 sampai 30 tahun untuk menjadikan IKN itu benar-benar layak dan menjadi ibukota yang, ya sesuai harapan, *gitu*. Ya, di sisi lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Harris juga, ya bukannya berinvestasi dengan mobil listriknya atau, apa namanya, Tesla-nya itu, Elon Mask malah datang ke sini bawa Starlink yang kita tahu sudah dikritisilahkan di beberapa kali rapat ini, dengan beberapa kementerian ya. Ya, yang itu nilai investasinya, sesungguhnya, *real*-nya berapa? Ada apa enggak? Dan belum, apalagi kalau kita bicara soal kaitan dengan serapan tenaga kerja dan di sisi lain ancaman, bagi BUMN kita.

Dan salah satu PR terbesar kita *kan* ya ini tentu yang pintu yang paling efektif untuk serapan tenaga kerja *kan* Kementerian Pak Bahlil ini ya, salah satunya, melalui pintu investasi. Indonesia saat ini punya surplus demografi, tapi surplus demografi ini bisa menjadi *benefit*, tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengelolanya, menjadi beban. Dan sudah kita juga baca di media, 10 juta Gen Z yang menganggur. Ini tentu tantangan atau PR buat kita bersama, juga termasuk PR dari Kementerian Pak Bahlil, ya.

Kemudian, kondisi lapangan, Pak, ini memang ada *curhatan-curhatan*. Di sisi lain memang saat ini dengan mekanisme perizinan OSS dan sebagainya, teman-teman, ya pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah ini yang banyak berinteraksi dengan saya, merasakan beberapa kemudahan. Tapi di sisi lain juga ada beberapa tambahan kesulitan, termasuk beban biaya yang cukup mahal, misalnya kalau dulu orang yang cukup *ngurus* IMB, Pak, sekarang ada SLF dan harus pakai konsultan. Dan itu mahal, Pak, biayanya, harus pakai konsultan. Nah, ini beberapa keluhan, *curhatan* yang saya sampaikan kepada Pak Menteri.



Yang terakhir, yang menjadi tema utama kita kali ini soal realisasi investasi. Ini apa saya salah baca atau *gimana*, Pak, mungkin bisa dilihat di halaman 2, halaman 2, "Target realisasi investasi 2020-2024 atas arahan Presiden Jokowi dan harapan datangnya investasi berkualitas, Target investasi ditingkatkan 2021 menjadi 900T, 2022 menjadi 1.200, 2023 menjadi 1.400".

Sementara, di sini Bapak sampaikan, nomor satu, "Nilai realisasi penanaman modal 2023", misalnya, kalau targetnya di situ kan 1400, di situ *kan* realisasinya cuman 1.099,8T ya. Berarti *kan* enggak mencapai target, Pak. Tapi di halaman yang ke-3, di halaman yang ke-3, ini di grafik itu kebalikannya ya, target Renstra-nya yang 1.099,8. Ini *kan* kayaknya yang lebih tebal *nih* capaiannya ya, berarti yang di atas *nih* yang lebih tebal itu, grafiknya itu, capaiannya 1.418,9. Nah, ini yang benar yang mana *nih*, Pak? Nanti mohon dijawab. Jadi antara halaman 2 dengan halaman 3, ya.

Saya kira itu, Pak pimpinan, yang baru berulang tahun dua hari yang lalu, semoga diberi keberkahan, kesehatan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Amin.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Dan selalu sukses.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Amin.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Setiap apa pun doanya, penutupnya, amin.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Aminnya di situ, Pak Menteri.



KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Ini kita sudah lama enggak ketemu, Pak Menteri, lebih sering lihat dia di TV kita, ya, Pak Menteri, ya. Ini lagi *rame* soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu sudah janji presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi, meskipun organisasi keagamaan lain menolak, cenderung ya. Saya enggak tahu, Muhammadiyah katanya masih *mikir-mikir*, walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak.

Nah, saya ingin sampaikan di sini, benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI. Karena sebenarnya untuk ormas agama yang *ngurusin* jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah, Pak, daripada dapat konsesi tambang, karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita.

Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri, bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir, Pak, *kan* banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita, *gimana* Legiun Veteran Republik Indonesia di sana, Pak? Yang sampai hari ini enggak dapat bulanan, Pak, mereka menderita.

Ya? Kenapa, Mas?

Iya, Enggak ada yang *perhatiin*, Pak, mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini, Pak, ya anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak, kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak?

Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini *quote and quote* yang enggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak?

Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di Republik itu, di dapil saya, Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor ke luar, mereka cuma gigit jari, Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun *diambilin* untuk yang namanya plasma dan *knitting*, sampai sekarang konflik semua, Pak.



Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini, Pak, distribusi keadilan itu? Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini *kan* hasil perjuangan semua orang, Pak. Bagaimana dengan Ormas, OKP, dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini *kan* harus dipikirkan juga, Pak, terutama masyarakat pribumi asli di sana, Pak, bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat (*indigenous people*).

Banyak organisasi adat di Kalimantan, Pak, hampir semua desa, kecamatan *tuh* ada lembaga adatnya, Pak, kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan kita ini, Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, enggak ada di Jawa, Pak. Ini *gimana* kita? Kalau memang serius mau memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan, jangan hanya adil dari sisi elite. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini, mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. *No*. Undang-Undang Dasar '45 itu mengatakan, bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita, Pak.

Saya pernah bertanya, sebenarnya berapa banyak *sih* tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu, berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM, Pak, bukan oleh investasi yang ribuan triliun itu, enggak, UMKM.

Lalu *gimana* kita, Pak, di situ, Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri, bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita, Pak, bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. *Wong* kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita *kok*, Pak, bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya enggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita.

Yang ketiga soal Starlink. Kalau bisik-bisik yang saya terima, itu cuma buat *ngeramai-ramaiin* World Water Forum. Kehendak untuk menjadikan itu benar-benar *internationally recognized*. *Tapi* untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka, Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita, Pak.

Sekarang mungkin belum, tapi *rapidly* itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat, dan sebagainya, itu sudah berjuang berdarah-darah, Pak. Telkom, Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit *low orbit*, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia *without do process*.

Lalu, apakah nanti Starlink Ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa enggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel, dan Indosat? Kalau untuk *rural area's*, Pak, *remote area's*, saya sepakat Starlink, Pak.

Saya pun sudah pasang, hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. *Tapi*, kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, *notabene*ya BUMN, kita kan harus mikir *dulu*, Pak, mau ke mana arahnya? Belum lagi dari sisi *national security*, Pak. Sekarang *oke*lah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik, *tapi* lama-lama akan ke sana, Pak.

Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang “Kalau *lu* enggak inovasi ya *biarin* mati *lu* sendiri”. *Kok* begitu *mikiran* bangsa ini? Kalau *gitu* buka aja semua biar manufaktur kita hancur, Pak. Silakan “asing”, ambil *aja* ini Republik, saya enggak terima itu pernyataan.

Apakah kita mau, apakah *apple* dan, *apple to apple* bersaing dengan Elon Musk? Enggak, Pak. Kita ini negara, BUMN punya persoalan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Ini menurut saya masalah yang serius, Pak, kalau begitulah cara pandang menteri senior kita, Pak, di mana kedaulatan kita? Di mana *dignity* kita sebagai bangsa? Ini kan *ngawur* kalau menurut saya.

Lalu, saya melihat target investasi, Pak, ini saya bangga sama Pak Bahlil karena investasi di luar Jawa meningkat terus. Ya, komitmen terhadap, apa namanya, luar Jawa itu bagus 48,3 tahun 2020, sekarang 51,7. *But*, ada tapinya, Pak, bagi saya itu berarti hampir semua investor ini hanya mengejar sumber daya alam kita, benar enggak? Bahwa mayoritas daripada investasi ini hanya untuk mengeruk kekayaan alam kita.

Itu kenapa mereka lari. Dan sejauh mana implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, kasih kami angkanya, Pak. Bagaimana peningkatan, misalnya ketimpangan di daerah itu, memang terjawab dengan investasi di luar Jawa itu, Pak. Atau yang justru masif adalah kerusakan lingkungan dan konflik-konflik agraria, konflik-konflik akses terhadap tanah, supaya kebanggaan kita sempurna *nih*, Pak, sama Kementerian Investasi, bahwa sudah mulai bergeser dari Jawa ke luar Jawa.

Tapi kita mau yang di luar Jawa itu tidak menyisakan penderitaan juga, *gitu*. Apakah dengan banyaknya investasi di luar Jawa, otomatis buat sejahtera, otomatis membuat, apa namanya, *economic scale*-nya meningkat, pendapatan daerahnya bertambah. Ini *kan* enggak bisa hanya melihat, ini investasi, yang lain urusan yang lain, enggak bisa, Pak.

Ini kan, saya mohon, Pak Menteri, katanya saya tahu kan Pak Menteri juga aktivis dan sangat kuat apalagi berasal dari luar daerah. Kami mau distribusi keadilan itu yang benar-benar, Pak, bukan distribusi keadilan di atas kertas. Sumber daya alam itu akan habis pada waktunya. Ketika nikel habis di Halmahera, di Maluku sana, apa yang tersisa buat mereka? Apa *sih* yang tersisa? Kecuali kolam-kolam menganga sebesar itu yang enggak bisa buat bertani, enggak bisa buat apa pun. *Environmental cost*-nya dihitung enggak? *How to recover that*, apa namanya, *big holes everywhere in that island*? Kita hitung enggak? Ini menurut saya mungkin bukan tanggung jawab, Bapak, *tapi*

sebagai sebuah rezim, saya kira harus *mikirin* itu, Pak, tanggung jawab sosial kita ke depan.

Lalu yang ke enam, yang ke lima ya, *sorry*, mohon maaf, Pak Menteri, kita lama enggak ketemu, jadi aku *curhatnya* di sini, karena salah Pak Menteri sendiri. Lalu ini target investasinya kenaikannya kecil, Pak, ya, dari berapa ini, 1.650 ke 1.800 sampai 1.300. Apakah belum ada gambaran dari Kementerian Investasi terhadap eskalasi peningkatan potensi investasi di IKN, Pak? Ini kenaikan 300 ini, bayangannya Kementerian Investasi, akan didapat dari mana, Pak?

Karena saya melihat, jujur *aja*, yang saya dengar, bahwa IKN tidak lagi menjadi target prioritas nomor satu dari pemerintahan mendatang. *So*, seperti janji presiden sebelumnya bahwa IKN ini *majority*-nya akan datang dari investor asing, *kan* harus dikebut, Pak, *otherwise*, APBN lagi, atau utang baru. Nah, ini *kan* perlu kami dengar juga, Pak, apakah target investasi IKN masuk dalam rencana kerja pemerintah 2025 ini yang menargetkan 1.800 sampai 1.900 triliun untuk investasi? Apakah investasi IKN itu masuk ke dalam itu?

Lalu yang terakhir, terakhir sekali, mohon maaf, Pimpinan, karena sedang berulang tahun, saya *lama-lamain*, paling nanti tinggal disalam *aja*. Ini soal *Gini Ratio*. Bapak di sini membandingkan antara peningkatan investasi dengan *Gini Ratio*. Apakah ini hitungan yang di luar dari, khusus kepada dampak investasi? Kenaikan *Gini Ratio* itu? Atau akumulatif dari seluruh faktor-faktor ekonomi kita? Ya, karena *kan* kalau ditaruh di sini, asumsi saya bahwa itu adalah *impact* daripada kenaikan investasi. Nah, atau kalau tidak, apakah dia merupakan agregat dari seluruh komponen yang ada, *gitu*, Pak Menteri.

Nah, saya kira itu saja, Pak Menteri.

Terima kasih, Pimpinan, yang berulang tahun. Mudah-mudahan semuanya diperbanyak, kecuali istri ya, Pak Ketua, ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Amin, Amin.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Yang lain boleh banyak.

Terima kasih, Pak Menteri dan jajaran.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Dedi.

Sebelumnya saya perpanjang *dulu* waktu sampai jam 12.45.



Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Saya persilakan, Pak Bardi.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,
Pak Menteri Pak Bahlil dan jajarannya,
Semua yang hadir pada RDP ini,**

Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, soal anggaran, ya soal anggaran 2025. Beberapa waktu ini kami Komisi VI telah melakukan satu rapat bahkan sampai *konsinyering*, dari mitra semua, mitra kerja, lembaga-lembaga dan kementerian. Tidak ada satu pun, satu lembaga atau kementerian yang tidak dipotong. Artinya tidak terpenuhi, artinya anggaran itu berkurang dari tahun 2024 ke 2025, semua berkurang tidak ada satu pun.

Yang berikutnya, semua tidak ada yang tidak minta tambah, semua minta tambah, ya semua minta tambah. Nah, sekarang ini pertanyaan saya, proses anggaran itu melalui satu mekanisme yang panjang, tidak dadakan, sekarang mau rapat dengan DPR, anggaran dibikin enggak? Ada satu proses yang panjang. Nah, kenapa semua dipotong? Pertanyaannya adalah kenapa dipotong? Kenapa berkurang? Ujungnya *kan*, apakah negara ini, pemerintah ini ada anggarannya? Ada, ada apa namanya, *budget* yang untuk mencukupi rencana tahun 2025 ini? Saya yakin karena *ndak* ada.

Nah, sehingga yang memiliki otoritas membagi uang ya Menteri Keuangan dan dengan Bappenas, dan tentunya sudah mulai satu proses yang panjang juga. Pembahasan ini dipotong, ini dipotong, ini tetap dan sebagainya. Belum, tidak akan mungkin karena dikurangi karena untuk bagi-bagi makanan pagi atau makan siang nanti, enggak. Untuk masyarakat dibagi makan siang, saya kira bukan itu, memang posisi anggaran yang mungkin berkurang, sehingga ada ini.

Nah, oleh karena itu, saya berpendapat realistis saja, ketika memang terjadi anggaran kurang, harusnya ada satu, apa, skala prioritas penting atau skala, ya namanya prioritas, penting ya. Ada satu skala prioritas, yang mana yang harus dipenuhi anggaran. Nah, yang lainnya tentunya yang tidak menjadi prioritas itu adalah mestinya bisa harus menerima, menerima keadaan yang ada. Ini yang harus kita, yang harus kita sikapi secara realistis.



Nah, di sini memang sangat tragis ya, BKPM ini turunnya drastis dari tahun 2024 ke 2025, mungkin bisa separuh lebih ini. Nah, kenapa demikian? Harusnya ada satu evaluasi internal di tingkat Kementerian BKPM, ya, Investasi itu harus ada satu evaluasi. Kenapa demikian? Yang lainnya juga kemarin tidak terlalu banyak juga, *tapi* juga *ndak* ada yang tidak dipotong semuanya.

Nah, oleh karena itu, menurut saya ya itu *kok* tidak apa ya, tidak relevan kalau ada arahan-arahan itu secara sporadis yang satunya. Mestinya pemerintah dalam hal ini, eksekutif, harus membuat skala prioritas, harus transparan kepada masyarakat, pada rakyat, bahwa anggaran ini kurang sehingga ada pengurangan *budget* di masing-masing kementerian dan lembaga. Harusnya begitu, *gentleman*, ya *gentleman*, jangan *ngomongnya* yang gede-gede, *tapi* kenyataan ini akan *mempengaruhi image* masyarakat di dalam perekonomian negara kita, masyarakat kita.

Nah, oleh karena itu, coba satu hal itu dicermati betul adanya satu prioritas, apa prioritas daripada yang mana yang memang harus dipenuhi oleh eksekutif oleh pemerintah. Kemudian juga yang kaitannya dengan internal, apa namanya, Kementerian Investasi dan BKPM itu dievaluasi. Kenapa? Kenapa *kok* mesti begini? Ada siapa? Dan kalau umpamanya sampai tidak diberikan tambahan juga ya, taruhlah presiden sudah *ngarah-ngarahin*, “Oh udah nanti uang, minta uang itu, ambil uang itu, dan sebagainya”, dan sebagainya itu, arahan *ndak* tahu. *Tapi* kalau sampai hanya ini, ya dilakukan suatu optimalisasi apa yang harus di, di, di, dikerjakan dalam tahun 2025. Itu pertama.

Yang kedua, saya mencoba untuk menambah dari apa yang disampaikan Pak Deddy tadi soal ini, yang marak sekarang menjadi media, yaitu pembagi izin-izin kepada ormas keagamaan. Saya coba membuka bahwa didirikan ormas itu adalah bukan untuk berbisnis maupun, ormas itu tidak hanya ormas keagamaan, banyak sekali ormas dan itu sudah dilindungi dengan dengan Undang-Undang Ormas. Ormas apa pun itu tidak berbisnis, *tapi* ormas itu adalah untuk kegiatan sosial, ada kepemudaan, ada keagamaan, bermacam-macam ormas.

Ketika Pak Menteri memberikan satu prioritas ya kepada ormas keagamaan, berarti ada diskriminatif, pada, bahkan sudah ada yang menolak dan sebagainya. Itu saya menilai cerdas yang menolak, karena apa? Bukan relevansinya ormas itu diberikan kegiatan. Karena proses *nambang*, proses izin itu bukan hanya sebatas *ngasih* izin lembaran, tidak. Ada proses yang panjang yang di situ di dalam kerangka hukumnya atau payung hukumnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya.

Kemudian, ada turunan-turunan yang dulu sudah digabung semuanya. Itu *kan* ada beberapa tuntutan, satu, tuntutan profesional, tuntutan modal banyak hal yang itu, lingkungan, dan sebagainya. Nah, kalau ormas, mana punya dia itu kompetensi itu? enggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ya jual

kertas, jual lisensi, jual izin. Nah, apakah kita akan berbisnis secara seperti itu, ya? Itu pertama.

Yang kedua, yang namanya tambang akan habis, seperti yang disampaikan Pak Deddy tadi, akan habis, ada waktunya habis. Kita harus berpikir yang realistis. Ketika kita di alam kubur, ya, *ndak* tahu nanti kita mau hidup berapa tahun di alam kubur kemudian kita, apa namanya, Indonesia sudah habis ini deposit sumber daya alamnya, kemudian rakyat Indonesia jadi miskin, makan *ndak* bisa, mati kelaparan, dan sebagainya. Apakah kita tidak berdosa?

Nah, hal ini tentunya menjadi pemikiran kita yang sekarang masih hidup, yang sekarang diberikan otoritas untuk mengatur itu, harus dipikir deposit ke depan, harus dipikir untuk anak, cucu, cicit kita yang ke depan. Mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, jangan hanya berpikir saat ini kepentingan apa.

Saya mungkin itu yang penting, jadi apa? Sumber daya alam ini dalam konstitusi kita Pasal 33 memang untuk kemakmuran rakyat, tapi rakyat mana? Apa rakyat sekarang? Tidak, rakyat cucu-cucu kita, rakyat sampai dengan, sampai mungkin sampai mungkin keturunan ketujuh, kedelapan atau seberapa pun. Itu inginnya konstitusi, bukan hanya inginnya rakyat yang sekarang berkuasa, rakyat yang sekarang hidup, rakyat yang sekarang menikmati, tidak. Tapi adalah semua yang hidup di Indonesia sampai kapan pun, sampai kiamat, itu dijamin, selama konstitusi itu tidak *dirubah* ini, *oke*.

Ini mohon nanti, Pak Bahlil, karena ini sudah ada pro-kontra, ya tolong di apa, evaluasi. Kalau memang itu tidak relevan, apa, urgensinya tidak masuk, ya enggak usah malu-malu, *batalin ndak* apa-apa, demi rakyat. Kita itu mengabdikan kepada rakyat ya, bukan mengabdikan kepada tauke.

Nah, kemudian yang ketiga, soal OSS, ya. Luar biasa gebrakan Kementerian Investasi dan BKPM, di mana dengan adanya program OSS itu tercatat, terdata pelaku bisnis dari UMKM kecil, banyak sekali, luar biasa. Percepatan perizinan punya dampak yang positif, tapi ada taktis, ya taktis. Saya dari Jogja, kemudian ada di Gunung Kidul itu, marak satu usaha-usaha yang namanya toko modern ya, Alfamart, Indomaret.

Jauh hari, pihak pemda biasanya masing-masing kabupaten itu sudah membuat perda pengaturan tata, pengaturan tentang toko-toko modern. Salah satu, langsung itu *real*, ya, di Kabupaten Gunung Kidul. Mereka membuat perda, *kalo* gak salah perda tahun 2021, *kalo* gak salah. Itu sudah diatur karena daerah itu daerah bukan perkotaan, daerah kampung, dibikin satu kecamatan hanya boleh dua, hanya boleh dua toko. Kemudian, dari jarak antara toko modern dengan toko modern supaya tidak merusak, apa namanya, pedagang-pedagang kecil, ya pedagang rumah yang apa itu yang setipe pada barang dagangnya, warung-warung dan sebagainya, jalan dan jaraknya sampai 500 meter.

Nah, yang terjadi apa? Yang sekarang ini baru tadi. Ada toko, sebuah toko, ya, toko modern, toko modern yang di daerah itu *kan* hanya Alfa, Indomaret, Alfa, Indomaret, itulah. Nah, salah satu Alfamart itu tokonya geser, sebelahnya, karena tidak cocok dengan nilai kontrak dan sebagainya, pokoknya geser sebelahnya, hanya berjarak 6 meter dari yang toko lama itu. Nah, begitu ini dibangun baru, ternyata yang lama itu, diambil oleh, dikontrak sama Indomaret ya atau Alfa, salah satunya ya. Kemudian, kepala dinas, yang terjadi, Kepala Dinas BKPM itu merekomendasi, maka OSS lah turun, datang, di salah satu, apa namanya, itu wilayah. Sehingga, dalam satu wilayah yang pedesaan, itu jejer sebelah *gitu*, bahasa *Jowone jejer*, itu berdamping hanya jarak 6 meter ada dua toko modern. Nah, pertanyaannya, kenapa kepala dinas itu menandatangani rekomendasi untuk bisa turunnya OSS? Mungkin ada, kita berasumsi *aja* mungkin dapat amplop, mungkin tidak tahu perda, mungkin bupatinya disuap, dan sebagainya, kita enggak tahu. Tapi, kenapa itu terjadi? karena juga mungkin karena alasan mereka mungkin karena takut karena *udah* melanggar OSS, Undang-undang Cipta Kerja.

Tapi ini suatu apa ya hal yang keniscayaan, ketika di daerah itu *udah* menata sedemikian ekonominya supaya bisa, apa namanya, bisa berkeadilan, itu menciptakan suatu persaingan yang enggak sehat. Yang namanya toko modernnya juga bersaing enggak sehat, yang apa, pedagang-pedagang kecil di kampung ruang-ruang kecil, habislah.

Nah, inilah dampak yang negatif yang perlu dari Kementerian Investasi dan BKPM untuk dicermati kembali. Jangan sampai di lapangan terjadi seperti itu, walaupun sebenarnya program OSS itu bagus, tapi belum tentu penerapan di lapangan sinkron dengan payung hukum atau undang-undang yang ataupun perda yang ada telah di dibentuk.

Mestinya akan ada penyesuaian-penyesuaian daripada Undang-Undang Cipta Kerja dengan undang-undang, apa, peraturan daerah ataupun peraturan bupati dan sebagainya, itu ada sinkronisasi harus ada. Ternyata itu disalahgunakan untuk hanya kepentingan sesaat, sehingga yang rugi adalah rakyat semua. Pengusaha juga mungkin berkurang, ya pendapatan rakyat yang akan rugi, itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Bardi.

Selanjutnya, yang terakhir, Pak Adi.

F-PD (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Pimpinan, Rekan-rekan Komisi VI, Pak Menteri beserta jajaran,

Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman, saya singkat saja. Yang pertama terkait dengan anggaran. Apresiasi kepada Pak Menteri dalam mengelola anggaran, saya lihat di sini semenjak tahun 2020 sampai 2023, penyerapannya sangat baik, selalu di atas 97% dan 2024 kalau saya lihat juga sesuai *timeline*, ini penyerapannya baik.

Tentunya kami prihatin untuk 2025, anggaran pagu indikatifnya itu sangat minim, mengingat tugas dari Kementerian Investasi ini dalam mendatangkan investasi perlu didukung anggaran yang maksimal. Tentu kami mendukung permohonan tambahan dari Kementerian Investasi sebesar 800 triliun, ya. Kita ingin ada *continuity* yang baik setelah masa bakti periode 2019-2024 dan tentunya 2025 menjadi tahun kunci dari pemerintahan baru dan kita berharap capaian investasi bisa tercapai sesuai target ke depannya.

Lain-lain, Pak Menteri, tadi menyambung teman-teman yang sudah menyampaikan juga soal, apa namanya, izin pertambangan untuk ormas keagamaan. Saya juga sependapat, saya kira saya rasanya kok kurang pas, kurang tepat mengenai kebijakan ini, ya. Dari segi tentunya bisnis atau usaha itu, lebih tepat kalau dijalankan oleh perseroan terbatas, karena dalam menjalankan bisnis tentu penuh dengan risiko, ya, tidak selalu untung. Dan kalau kita lihat dari kacamata ormas, tentunya ormas ini didirikan bukan untuk berbisnis atau mencari keuntungan apalagi ormas keagamaan. Tentunya tujuan utamanya adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan tujuannya kepada para anggotanya.

Tetapi tentu kalau kita mau membantu ormas, seperti ormas keagamaan untuk lebih maju lagi, menurut saya, ada cara-cara lain yang lebih tepat atau lebih pas ya, salah satunya kalau kita ingin mendorong untuk ormas itu melakukan usaha, mungkin kita lebih tepat kalau kita memberikan pembekalan kepada mereka untuk membentuk koperasi, ya.

Kita *ketahui* semangat koperasi adalah semangat untuk memajukan para anggotanya, ya, dan ini lebih pas menurut saya untuk ormas. Ormas adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, koperasi juga adalah semangatnya adalah kumpulan orang bukan kumpulan kapital, ya. Dan koperasi bisa bermacam-macam, simpan pinjam, perdagangan, apapun itu sesuai yang dibutuhkan oleh ormas.

Jadi, kalau kita mau mendorong ormas atau anggota ormas untuk berusaha, saya pikir lebih tepat kalau ini dalam bentuk koperasi, ya. Mungkin Pak Menteri nanti bisa juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Membantu Ormas dengan cara lain juga termasuk tentu pemberian CSR. Itu juga bisa, ya, melalui BUMN dan lain-lain, tentu aturan-aturannya bisa kita atur bersama.

Jadi, kembali lagi, Pak Menteri, terkait dengan kebijakan memberikan izin tambang kepada ormas, kami merasa ini kurang tepat dan kurang pas.



Lain-lain, tadi juga sudah disampaikan mengenai keberadaan Starlink. Starlink ini tentu menjadi bisnis atau usaha yang disruptif ya, menawarkan interkoneksi dengan menggunakan *low orbit* satelit, yang mereka punya, mereka miliki. Tentu ini akan *merubah* usaha-usaha, tentu apa, dalam industri internet *provider* dan lain-lainnya.

Kalau menurut saya, kalau ini, layanan ini diberikan untuk industri, awalnya seperti perkapalan, mungkin ini tepat, apalagi saat ini biaya logistik kita *kan* juga kita terus-menerus ingin menurunkan yang sekarang masih tinggi. Dan ini bisa membuat seperti industri perkapalan kita lebih efisien ya, dalam berkomunikasi dan lain-lainnya.

Juga ini bisa mendukung industri-industri lain yang sifatnya *remote* ya, beroperasi di *remote area* dan lain-lainnya. Tetapi kalau ini langsung dibuka untuk retail, itu kita juga harus perhatikan keberadaan Telkom, operator-operator lain yang sudah berinvestasi, berinvestasi banyak dalam membangun jaringan BTS-BTS mereka ya. Jadi, saya kira tidak bisa langsung untuk dibuka sebegitu luas, sehingga, apa namanya, mengganggu investasi-investasi yang sudah dilakukan dari banyak pihak sekarang.

Saya juga ingin bertanya soal keberlangsungan investasi di Kepulauan Riau yang sempat ramai itu, sudah sampai di mana statusnya, Pak Menteri? Mungkin bisa di-*update* kepada kami.

Mungkin itu saja, Pimpinan, dari kami.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalikumsalam,

Terima kasih, Pak Adi.

Dari anggota sudah semua, saya ingin

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Sedikit, Pimpinan. Tambahan sedikit, karena ada lain-lain. *Nambah* sedikit saja ini, *nanya* persoalan di Starlink ini.

Saya setuju dengan Starlink ini terus dikembangkan, karena ini sangat menguntungkan buat masyarakat luas. Memang di satu pihak ada akan dirugikan, yaitu pengusaha-pengusaha sebelumnya, memang agak dirugikan. Ya, itu adalah sebuah hal yang wajar saja kalau memang tidak berinovasi. Betul apa kata Pak Menko, Pak Luhut kemarin, bahwa ya yang paling penting



itu masyarakat menikmati, masyarakat kelas bawah menikmati, lebih efisien lebih efektif, terhadap perkembangan daripada teknologi.

Ketika mereka mendapatkan teknologi yang berkembang dengan baik, artinya mendapatkan sumber informasi dengan mudah, maka tentu akan ini menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat, *gitu*. BUMN sendiri, *kan* kalau kita berbicara Telkom seumpamanya itu ya. Telkom keberadaannya, selama itu swasta bisa, selama itu, enggak perlu ada BUMN, *gitu*. Jadi, selama swasta bisa, sebenarnya enggak perlu ada BUMN.

Nah, kemudian dulu sempat Telkom adalah mayoritas semuanya Telkom, tapi begitu datang pengkoreksi, XL, Indosat, langsung turun harganya. Saya masih ingat *tuh*, kebetulan saya mengikuti terus dari punya *handphone* yang, apa, Ericson yang dari di mobil saja sampai teknologinya seperti sekarang, saya *ikutin* terus. *Dulu*, waduh Telkomsel itu merajalela dengan harga yang sangat, sangat tinggi yang akhirnya terkoreksi oleh swasta.

Sekarang ada mengoreksi lagi harga-harga yang tinggi ini. Saya sangat bersyukur ya, masyarakat akan sangat bersyukur dengan adanya koreksi daripada, apa, harga dari kemudahan ataupun harga mudahnya akses terhadap informasi ini, ya. Memang mungkin kalau ditakutkan adalah bocornya rahasia negara dan sebagainya, itu *kan* tugasnya teman-teman di *cyber security* di Indonesia yang harus *mengkoreksi* itu, *gitu*.

Itu, karena dalam sepengetahuan saya di negara yang demokratis ini ya, kita, BUMN itu hanya *agent of development*, agen pembangunan. Agen pembangunan artinya tidak mesti bersaing dengan swasta, kalau selama bisa swasta, silakan, *airport* saja sudah dibuka dengan Undang-Undang nomor 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, *airport* pun kalau memang sudah swasta bisa mengerjakan, silakan swasta.

Nah, pemerintah ke mana? Pemerintah ke daerah-daerah *remote* lagi, membangun *airport*, *gitu*. Jadi, jelas kita konsep kita adalah selama itu bisa dikerjakan swasta, selama itu efisien, selama itu membuat persaingan usaha yang baik, saya sangat mendukung, apalagi itu menguntungkan masyarakat yang sangat luas.

Itu barangkali, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Demer.

Dari anggota sudah, Pak Menteri. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai anggota juga.



Tentang anggaran. Tadi saya sudah sampaikan, *curhatan* Pak Menteri memang agak salah kamar. Jadi, mestinya ini diselesaikan di domain eksekutif terlebih dahulu, baru kita menyetujui atau tidak menyetujui.

Yang kedua, saya ingin kita berkaca juga dan *husnuzon* saya kepada Menteri Keuangan dan Bappenas, jangan-jangan karena Menteri Keuangan yakin betul dikasih anggaran berapa pun, investasi tercapai di tangan Pak Bahlil ini. Jadi, saya khawatir itu, kalau kita mau *husnuzon* ya *kan*. Jadi, apakah Menteri Keuangan itu berpikir seperti itu? Karena melihat *track record* Kementerian Investasi, lalu menurunkan pagu anggaran, tetapi tetap mencantumkan target pertumbuhan investasi sedemikian tinggi sampai 1.800 triliun.

Yang kedua, karena ini di akhir periode, apakah Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas sudah tidak takut lagi sama Pak Jokowi? Sudah tidak mungkin lagi di-*reshuffle* karena sudah di akhir periode, tidak mungkin diapa-*apain*, sehingga kementerian di bawah orang terdekatnya pun diturunkan nyaris 50%. Ini serius ini, serius.

Jadi, ketiga, *kan* saya juga melihat Pak Menteri ini dekat sama presiden terpilih. Apakah mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk dipilih di kabinet, sehingga menteri terdekat pun dari presiden terpilih, anggaran diturunkan sampai hampir 50%.

Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan diagnosis ini juga layak untuk disampaikan, karena ini kementerian yang sangat penting. Saya tidak yakin, orang secerdas Menteri Keuangan tidak menganggap investasi ini bagian penting dari pertumbuhan ekonomi, dan saya juga tidak yakin tentang pengetahuan disiplin anggarannya. Kalau mau targetnya naik, anggarannya juga harus naik.

Jadi, pertanyaan mengapa itu harus dijawab juga oleh kita semua, terutama oleh Pak Menteri Investasi. Jadi, mudah-mudahan *husnuzon* tadi itu yang betul. Jadi, karena *udah* yakin betul berapa pun kasih anggaran, tetap tercapai pertumbuhan investasi kita.

Kedua, tentang yang agak heboh-heboh ini karena ada tadi disinggung oleh rekan-rekan, tentang pemberian izin tambang kepada ormas. Memang ada yang menganggap ini diskriminasi, tapi kalau saya pribadi itu diskresi. Jadi, antara diskriminasi dan diskresi itu agak beda-beda tipis. Tetapi ada perbedaan yang sangat fundamental, kalau diskriminasi itu ya memilih tentu tidak berdasarkan alasan. Aasannya ya alasan karena sesuatu yang suka atau tidak suka saja. Orang dipilih bukan karena suatu alasan yang fundamental. Tetapi kalau diskresi, memang ada alasan yang fundamental dari pemerintah untuk memberikan izin itu dan kalau saya pribadi memandang itu adalah diskresi.

Kenapa itu diskresi? Karena beberapa ormas keagamaan kita itu ada lebih dulu dari republik ini, mereka berjuang untuk republik ini dan organisasi ormas keagamaan ini, itu bahkan lebih besar daripada organisasi negara, ya. Ormas NU, organisasinya lebih besar daripada organisasi negara. Kalau di



pemerintah, ada pemerintah pusat, ada gubernur, ada kabupaten/kota, dan sebagainya. Kalau ormas seperti NU, ada PBNU sampai ranting itu disebut ranting adalah kelurahan, masih ada juga anak ranting, di bawah anak ranting masih ada kelompok-kelompok pengajian. Jadi, organisasinya sebenarnya lebih besar daripada organisasi negara, tetapi mereka sangat mandiri selama ini, entah bagaimana cara hidupnya, mereka bisa bertahan hidup dan memberikan kontribusi besar bagi negara kita.

Kalau dihitung, Pak Menteri, dihitung saja, kalau itu dihitung berdasarkan anggaran pemerintah, menyalakan lampunya organisasi kayak NU itu dari PB NU sampai anak ranting, itu negara mungkin sudah tidak kuat untuk menanggung. Untuk menyalakan lampu kantornya saja dan memberikan gaji bagi karyawannya saja.

Tetapi selama ini mereka bisa mandiri, tentu dengan segala cara, tertatih-tatih, dengan segala jerih payah dan bagian dari itu adalah kontribusi orang-orang yang ikhlas memberikan bantuan dengan segala keterbatasannya. Jadi, kalau negara mau memberikan diskresi pada ormas semacam itu, menurut saya itu bagian dari juga membantu orang-orang yang jerih payahnya selama ini juga berkontribusi terhadap ormas semacam itu.

Di luar itu, ada diskresi-diskresi yang mesti juga diberikan, yaitu kepada masyarakat adat di daerah, kepada masyarakat, organisasi masyarakat di daerah wilayah tambang yang selama ini barangkali tidak menikmati secara maksimal pertambangan-pertambangan seperti itu. Saya sepakat dengan beberapa kawan, mereka lebih banyak sebagai korban daripada sebagai penikmat pembangunan.

Mereka selama ini hanya menyaksikan betapa tanah kekayaannya itu dieksploitasi sedemikian rupa oleh orang Jakarta, oleh pengusaha-pengusaha yang berkolaborasi dengan politisi-politisi Jakarta untuk mengeruk kekayaan alam mereka. Kalau itu juga bisa diberikan diskresi oleh pemerintah, tentu ini memberikan harapan segar bahwa betul-betul bumi dan kekayaan di dalamnya itu digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan oleh tauke-tauke Jakarta atau pihak asing yang berkolaborasi dengan aparat pemerintahan kita, termasuk politisi-politisi kita.

Jadi, kalau memang niatnya ada diskresi, mari kita secara terus ikhlas memetakan betul siapa yang layak untuk diberikan diskresi terhadap kekayaan alam kita.

Barangkali itu, Pak menteri.

Pak Martin ada? Cukup?

Saya persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya, terutama sekali agenda utama kita dan mohon maaf nanti kesimpulan kita adalah kesimpulan berdasarkan agenda utama kita, karena apa pun yang saya *concern* tadi itu, tentu butuh pendalaman-pendalaman lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya.



Kami silakan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Pertama, saya ucapkan terima kasih atas pendalaman materi dan materi saya bagi menjadi tiga secara umum,

1. adalah menyangkut dengan topik utama anggaran dan evaluasi;
2. menyangkut dengan IUP keagamaan;
3. itu menyangkut Starlink, dan;
4. lain-lainnya, yang terkait dengan pekerjaan Tupoksi Kementerian Investasi.

Yang pertama, Pimpinan, saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan menyangkut anggaran. Rasanya sih *curhat* sih enggak, cuma saya ingin mengatakan *aja* bahwa apa pun diputuskan oleh pemerintah karena membahas anggaran ini *kan* eksekutif dan legislatif. Karena kami berpandangan bahwa mitra kerja kami adalah Komisi VI dan setiap rapat nanti Komisi VI akan mengejar kami terkait dengan KPI.

Karena itu saya *stressing* bahwa berapa pun dikasih, enggak ada masalah, tapi tolong dicatat dalam kesimpulan, bahwa kami tidak mengiyakan RKP 1.850 triliun. Kenapa? Karena itu terkait dengan pertanggungjawaban nanti untuk Komisi VI menghajar Kementerian Investasi. Jadi, saya sudah memasang blok *dulu*.

Mau dikasih berapa pun, enggak apa-apa, karena kami Kementerian Investasi enggak punya domain untuk menolak atau meng apa, enggak, *cuman* maksud saya adalah harus berimbang antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab, itu *aja kok*. Mau diturunkan juga enggak apa-apa, turunkan lagi targetnya. Jadi, kalau saya prinsipnya itu.

Bahwa kemudian nanti apakah karena, apa, penilaian dari Ibu Menteri bahwa kepemimpinan kami di sini, saya pikir *kan* saya harus berpikir yang terjelek, karena masa bakti Kementerian Investasi ini *kan* 2024 Oktober berakhir. Jadi, saya tidak mau meninggalkan *legacy* juga yang seolah-olah menteri berikutnya itu mendapatkan hal yang tidak pas untuk kemudian saya memperjuangkan, itu *aja kok* prinsipnya, Pak Ketua.

Jadi, yang penting masukkan di kesimpulan dulu, bahwa kami menerima, enggak ada masalah. Jadi sifatnya menambah, bebannya dinaikkan, apa namanya, berkurang, ya bebannya juga dikurangi. Itu *aja kok*, enggak ada hal yang berat di situ.

Yang kedua, menyangkut dengan pertanyaan dari teman-teman saya yang terhormat, Pak Haris, Pak Dedi, dan hampir semua terkait dengan



Starlink dulu, Starlink, Elon Musk. Saya boleh jujur ya di ruangan ini, saya tidak meng-*handle* langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, enggak? Kalian pernah? Enggak pernah, untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink.

Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya, menurut data OSS, Pak Deddy, supaya jangan ada dusta di antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar, Rp30 miliar *nih*. Ini menurut data OSS ya, ini menurut data OSS ya, tenaga kerjanya tiga orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya enggak bisa memberikan penjelasan tambahan, karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multiinterpretasi.

Tetapi, karena ini adalah investasi, juga merupakan bagian tanggung jawab kami, untuk menjelaskan kepada Bapak-Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami, karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis, jadi kami tidak tahu, tidak terlibat.

Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi, tapi saya, Pak Deddy lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS *aja* jadi OSS itu *kan* siapa pun di belakang ruang, di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS, karena izinnya sekarang *kan* tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar *kok*, selama memenuhi aturan ya, Pak Deddy. Jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu *kan* enggak bagus juga, *gitu*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya enggak tahu, Pak Menteri, jujur.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Oh.

Ya, itu *aja*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya enggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal-hal teknisnya? Apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang *ngomong* dengan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):



Saya, saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. *Oke*, biar *clear* ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Enggak ada koordinasi, Pak?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Justru enggak *clear*, Pak. Kalau Pak Bahlil *nih*, kawan saya yang baik ini bilang, “Kementerian Investasi enggak terlibat”, saya enggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa, karena kan Starlink ini enggak baru, Pak, sudah lama, *gitu kan*. Terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan *bla bla bla*, secara teknis, apakah dengan Kementerian Informasi?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Ya mungkin ada hubungannya, karena itu menyangkut dengan, apa namanya, satelit ya, satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran NIB-nya saja, NIB, terus kemudian izin apalagi?

SEKRETARIS MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (IKMAL LUKMAN):

Izin dasar.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Izin dasar *aja* dan itu keluar tanpa harus ketemu dengan tim pun, lewat OSS *udah* bisa, selama sudah ada notifikasi dari kementerian teknis, itu sudah jalan. Jadi, kajiannya itu mungkin lewat kementerian teknis. Mungkin, sekali lagi saya katakan, mungkin, karena oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi, mungkin kementerian teknis. mungkin, Pak Deddy, ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya pokoknya, domainnya Pak Menteri enggak tahulah.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Ya, domain saya, saya enggak tahulah. Jadi, saya jangan memberikan keterangan hal yang saya tidak tahu. Tapi perasaan, suasana kebatinan, saya sangat memahami. Karena betul kita juga melakukan investasi, tapi *national interest* itu juga saya pikir adalah bagian terpenting untuk kita bisa melakukan kolaborasi selama tidak menabrak aturan, tapi harus ada *sharing* juga itu bagus. Itu satu ya menyangkut Starlink.



Menyangkut dengan IKN. IKN dulu *nih*, ini Pak Harris, Pak Amin dan beberapa, Pak Dedy juga, bicara tentang IKN. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya, belum ada PMA yang melakukan *ground breaking*. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel *udah* hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN.

Kalau ditanya, kenapa belum ada investasi asing? Desain kita itu adalah kluster pertama ini selesai, yang disebut dengan, apa, jalan utama ya, lingkaran satu, sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah, sekarang mereka belum bisa lakukan, karena apa? Karena infrastruktur untuk masuk di kluster pertama ini belum selesai 100% dan sekarang masih kita lakukan percepatan.

Kemarin kami juga melakukan *ground breaking* beberapa pembangunan sekolah. R&D dari Bakri Group, dengan Pertamina, juga lagi proses pembangunannya. Jadi, kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak? Ada, semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita, kapan mereka bisa memulai, tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di kluster kedua itu baru bisa *clear*-kan, baru bisa *clear*. Itu menyangkut dengan IKN.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak Menteri.

Maaf, Pimpinan, pendalaman aja. Ya sekarang *kan* yang masuk di IKN itu *kan* APBN dan PMDN ya, Pak, ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Ya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya tahu *udah* ada hotel tuh 190 kamar, di luar itu *sih* belum, yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya *kan*, kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka masuk ke ekosistemnya *udah* jadi. Pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu, Pak? Ada berapa banyak? Dan untuk apa saja? Kalau memang tadi *kan* ceritanya *kan*, *oke* ekosistem tahap pertama Intinya kita bangun, lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk.

Nah, pertanyaan saya, itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan *invest* di situ dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MoU atau apa *gitu*, Pak?



MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Baik, izin, Ketua, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Deddy, agar lebih detail penjelasannya, mungkin kami laporkan secara tertulis, mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU, membangun kesepakatan dan kapan. Agar saya tidak salah dalam *ngomong* karena tadi saya tidak menyiapkan data itu, karena materi rapat kita lebih mengarah kepada anggaran, jadi mohon maaf. Tapi untuk memenuhi kewajiban saya atas pertanyaan Pak Deddy, izinkan saya juga untuk memakai ruang untuk menjawab secara tertulis.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Eggak masalah, Pak, karena saya tidak menyinggung-nyinggung soal anggaran, karena kita *udah konsiyering* kemarin. Jadi, *no issue* di sana.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Iya, iya. saya menghargai, *tapi* juga karena ada ruang yang saya bisa pakai untuk jawab tertulis, jadi mohon juga kalau bisa diizinkan, Pak Deddy, ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau perlu, Pak Menteri, kalau perlu nanti kita bahas secara khusus.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Boleh, sambil makan, informal tapi serius, boleh, boleh, boleh.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya Kalau, Pak Menteri, ada waktunya *aja*, karena super sibuk dia.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Ya, kira-kira begitulah.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mudah-mudahan waktu makan itu enggak ada dusta di antara kita.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Yang berikut, menyangkut dengan IUP konsesi untuk organisasi keagamaan. Jadi, begini *loh*, itu berangkat dari satu pemikiran, Pak Deddy, waktu saya jadi kepala BKPM pertama. Banyak, baik individu maupun secara organisasi, khususnya datang ke Bapak Presiden maupun ke saya. Apa *omongan* mereka? “Pak, kenapa IUP itu dikasih ke asing? Terus kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus, *konglo-konglo*? Kenapa kita tidak bisa dikasih?” Itu aspirasi, Pak.

Yang kedua, secara filosofis, tidak bisa kita *naifkan* bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini, itu banyak yang terlibat, salah satu di antaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan, di luar daripada *person to person*. Bagaimana sejarah kita tentang Serikat Islam, bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan.

Dan jujur saya harus mengatakan bahwa pada garda terdepan itu banyak orang, tapi salah satu di antaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga mereka pada posisi garda terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun '48, yang memberikan fatwa jihad, itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu, belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang *kok*. Pada saat konflik di Ambon, Pak Deddy, yang memediasi apa? Tokoh-tokoh agama-agama, saudara-saudara kita, agama Kristen, dengan tokoh-tokoh dari agama Islam. Konflik di Poso.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, izin, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Eggak, saya harus jelaskan ini, saya dikasih waktu juga.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya, saya harus potong sedikit, Pak Menteri, Pimpinan melalui Pimpinan. *Reasoning*-nya saya enggak keberatan, Pak. Ya, kita tahu, semua, tidak hanya NU juga berkolaborasi dan berkorban untuk bangsa ini, dalam semua tahap revolusi kita.

Tadi pertanyaan saya *kan* bukan soal setuju, enggak setuju NU. Penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu, yang menjadi pertanyaan saya *kan* di luar mereka juga banyak yang berkontribusi untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Pimpinan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Apa namanya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh enggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Silakan, Pak, tapi maksud saya itu

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Saya mengerti, saya akan masuk ke situ, Pak Deddy. *Kan* Bapak-Ibu Anggota DPR juga *kan* dalam memberikan pertanyaan *kan* ada prolog, filosofisnya, masa saya enggak boleh? Boleh izin, Pak Deddy, sahabat saya, kalau sudah saya diizinkan, saya mulai lagi, *gitu*.

Jadi, apa yang saya mau sampaikan? Jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka ini jadi penonton, itu landasan filosofisnya.

Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 33 dan pemerataan keadilan. Aspek demokrasinya, itu harus ada *civil society* yang kuat. Dan bangsa ini tidak bisa hanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga harus dibaringi dengan pertumbuhan karakter bangsa yang kuat dan itulah peran tokoh-tokoh agama, itu kira-kira.

Nah, kaitannya dengan itu, pasti ada landasan aturannya. Orang banyak mempersoalkan, waktu di awal, PP ini dibuat ada aturannya enggak? Teman-teman, Bapak-Ibu semua Yang Mulia, pasti lebih paham daripada saya tentang undang-undang.

Mekanisme proses pembuatan PP itu dilakukan lewat mekanisme rapat koordinasi antar kementerian teknis, dibahas prosesnya, setelah itu dirataskan, baru keputusan ratas itu lahirlah PP. Dan dasar daripada PP sebagai pohon gantungannya itu adalah pada perubahan Undang-Undang Minerba Pasal 6 ayat 1 poin j.

Nah, sekarang pertanyaan, kenapa organisasi kemasyarakatan keagamaan *dulu*? *Kan* itu yang menjadi, jadi kita berikan prioritas kepada mereka sebagai awal dulu, awal, kita lihat perkembangan yang kedua.

Nah, kaitannya dengan Pak Deddy tadi punya pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang di lokasi-lokasi tambang? Ini bagaimana? Pak Deddy yang saya muliakan, Perpres 70 tentang Pencabutan IUP, salah satu di antaranya adalah kita akan memberikan pendistribusian UMKM daerah. IUP-IUP ini, contoh batu bara di Kaltara, nikel di Sulawesi Tengah, ya kita kasih *aja* orang-orang daerah situlah, masa semuanya harus dikuasai oleh orang Jakarta *sih*, *tapi* yang memenuhi syarat.

Jadi ada instrumennya juga, Pak. Saya memikirkan tidak hanya yang besar-besar, yang kecil juga saya memikirkan. Koperasi, BUMDes, itu salurannya nanti lewat Perpres 70 terhadap IUP yang dicabut, kita juga akan memberikan sebagai skala prioritas kepada mereka.

Artinya apa? Betul bahwa organisasi kemasyarakatan ini tugasnya bukan cari duit, betul. Tetapi harus kita ingat, bahwa organisasi masyarakat ini juga punya badan-badan otonom, punya badan-badan bisnis yang kesemuanya ini mereka bisa melakukan kolaborasi untuk saling *men-support*.

Jadi, rasanya *sih* saya enggak setuju, ya, kalau pendapat bahwa harus yang memberikan IUP itu harus kepada, apa, perusahaan-perusahaan gede. Yang kita kasih ini ke perusahaannya, contoh NU, NU itu membuat PT, PT yang dibuat oleh NU itulah IUP-nya kita kasih ke mereka, dan ini sangat selektif, tidak gampang. Sebab apa? IUP itu tidak dapat dipindahtangankan, kalau dipindahtangankan, jadilah makelar *kayak* begitu, kayak tadi bisa jual beli jual beli, ini enggak bisa, Pak. Jadi, begitu IUP, dia enggak bisa dipindahtangankan.

Kemudian saham, pemilik daripada PT itu bisa koperasi daripada organisasi kemasyarakatan itu atau *blending* dengan orang yang ada dalam organisasi kemasyarakatan itu. Dan organisasi kemasyarakatan sekarang, jangan kita berposisi seperti dulu-dulu, mereka ini kadernya bagus-bagus *kok*, sudah ada juga yang pengusaha-pengusaha gede, ada juga uangnya.

Jadi, kalau kami berpandangan, Pak, selama ini kita lakukan sesuai dengan kaidah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa tidak?

Berikut juga ada pertanyaan, *loh* mereka *kan* tidak punya spesifikasi di tambang. Bapak-Ibu semua, saya ini *kan* mantan pengusaha tambanglah, *emang* saya dari Papua datang langsung jadi pengusaha tambang? *Emang* saya paham tambang? Enggak. Dapat konsesi, baru kita suruh kontraktor kerja. Freeport juga *kan* menyuruh kontraktor.

Yang penting di situlah kehadiran pemerintah untuk mendampingi mereka dalam rangka mencari *partner* yang baik, yang tidak dimanfaatkan, tetapi bisa melakukan *sharing profit* yang baik. Tujuannya apa? Agar



organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal, dan mandiri, untuk bisa membiayai program-program mereka tentang pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain.

Saya pikir itu, Pak, kira-kira garis besarnya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Nanti hal-hal teknisnya nanti pada saat pertemuan kita.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, izin, Pimpinan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Di rapat informal.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ini *kan* sangat penting, Pak. Bapak punya komitmen untuk organisasi di luar organisasi keagamaan juga akan dapat, Pak, ya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Sorry, tadi yang itu untuk UMKM.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Gini, saya, apa namanya, kalau UMKM ini, Pak, terserahlah, tapi saya enggak terlalu ini kalau UMKM, ujungnya *kan* nanti pendana juga. Saya bicara tentang organisasi, Pak, kelompok masyarakat. Misalnya tadi saya katakan, Legiun Veteran itu sekarang semua hidupnya merana, Pak, saya banyak bertemu mereka. Apakah kelompok seperti ini juga tidak perlu kita perhatikan?



Khusus di Kalimantan misalnya, itu masyarakat yang berkorban ketika konfrontasi dengan Malaysia. Kalau saya ke dapil, kalau saya ketemu, pasti mereka mempertanyakan juga, negara tidak pernah lagi memberikan kepada mereka insentif bulanan atau apa pun, padahal mereka sudah tua-tua. Ini *kan* kelompok masyarakat yang kalau mengikut apa yang Bapak tadi katakan, berjuang untuk republik ini mempertaruhkan nyawanya.

Lalu yang ketiga, masyarakat adat, Pak. Di Kalimantan itu, Pak, sampai desa-desa itu punya yang namanya lembaga adat Dayak, misalnya, ada Dewan Adat Dayak di setiap kabupaten kota maupun provinsi.

Nah, ini *kan* sebenarnya pemilik langsung dari kekayaan alam kita itu. Ini bagaimana, Pak? Karena kalau larinya ke UMKM lagi, mohon maaf, Pak, bukan saya *prejudice*, Pak, ya kita sudah mengalami, apakah itu koperasi, UMKM, ujung-ujungnya di belakang *kan bohir* juga, Pak, larinya ya.

Nah, ini *gimana*, Pak? Saya butuh, karena memang mereka bertanya, ketika saya kundupil mereka tanya, "Pak, itu ormas keagamaan kami ini *gimana?*" *Gitu*. Dewan Adat Dayak yang APBD-nya enggak ada, ya? *Kan* mereka juga perlu mempertahankan, melestarikan budayanya, Pak. Karena kalau di sana itu ada masalah, mereka enggak ke polisi, Pak, tapi ke Dewan Adat. Nah, ini *gimana* memperlakukan mereka, *gitu*. *Kan*, Ini nanti takut saya menimbulkan kecemburuan sosial. Di daerah mereka ada NU, mendapat konsesi, mereka di pinggiran hanya *nonton*, Pak, nanti *kan* ini jadi potensi konflik. Itu yang menurut saya perlu timbangkan.

Jadi, kalau setelah ormas keagamaan, dewan-dewan adat yang ada di tempat-tempat itu sebagai penghasil tambang, bagaimana memperhatikan mereka? Ini cuma CSR. CSR itu pun biasa diambil sama kepala daerah, Pak, rakyat itu enggak dapat apa-apa, Pak. Itu yang saya maksud.

Makasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, Pak Deddy.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Baik, saya.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Izin, Pimpinan, sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Sebentar-sebentar.

Jadi mungkin *concern-nya* Pak Deddy tadi itu betul, Bapak, *gitu*. Dicatat saja, pada gilirannya juga menjadi *concern* kita, *kan* kita tadi bilang, ada diskresi. Nah, diskresinya tolong diperhatikan, dari masyarakat adat, atau veteran dan sebagainya.

Silakan Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Saya mungkin, izin.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Izin, sedikit.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Menyangkut ini lagi?

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Yes.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Jadi, Pak Menteri, yang saya persoalkan bukan jasanya NU terhadap republik ini, sudah jelas kalau itu. Republik ini berdiri atas perjuangan para kiai dan santrinya NU, sehingga ketika itu kemudian ada bagi-bagi dan mereka dapat ya, menurut saya masih bisa dimengerti dengan mudah.

Pertanyaan saya tadi, apakah benar ini suatu diskresi? Dan apakah benar Pak Bahlil punya kewenangan untuk memberikan diskresi ini? Karena kita tahu sebelumnya *kan* ada pernyataan yang *clear*, bahwa izin tambang tidak boleh dibagikan, *tapi* dilelang. Ini yang pertama.

Yang kedua, izin tambang hanya boleh diberikan oleh Kementerian ESDM. Nah, ini yang menjadi *concern* saya. Kalau memang ini sesuai kewenangan segala macam dan memang seperti yang tadi Pak Bahlil katakan mereka punya lembaga yang mengelola secara profesional, sehingga mereka mendapatkan dana untuk membiayai aktivitas mereka, *oh* ini enggak ada masalah sama sekali.

Makasih.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):



Ya, baik.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, silakan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Kalau *gini*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Singkat *aja*, singkat *aja*, Pak Menteri, biar cepat.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Singkat *aja*. Diskresinya, Pak, kita itu atas arahan, kita godok antara saya sama Menteri ESDM, kita lihat, *inventarisir*, mana organisasi kemasyarakatan yang menjadi prioritas. Kemudian, kita laporkan kepada Bapak Presiden, setelah itu baru diputuskan. Jadi posisinya adalah masih posisi seperti sama, kalau ESDM itu bahan hulunya di atas, IUP-nya baru di kami.

Nah, kalau WIUPK-nya tetap berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, *Eh*, ESDM. Jadi, normalnya seperti biasa saja, jadi enggak ada yang tumpang-tindih di sana. Dan apalagi ini *kan* masuk dalam Satgas dan Satgas itu adalah ketuanya saya, kemudian anggotanya Pak Menteri ESDM. Kami sama-sama *kok*, memutuskan sama-sama.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Bahlil, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):



Baik, *makasih*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kita akan bacakan draf kesimpulan, nanti yang lain-lain perlu pendalaman, usulannya Pak Deddy, ya kita *ngobrol*. Kita ketemu, boleh secara serius, boleh FGD yang serius, boleh FGD yang santai juga boleh. Masa sampai akhir periode enggak pernah begitu *sih* ya, Pak Deddy ya?

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Pimpinan, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Halaman 2 sama 3, itu *loh*, Pak. Tentang realisasi investasi.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Enjeh, enjeh.

Betul, betul, betul.

Pak, mohon maaf, mohon maaf, mohon, Pak Amin, mohon maaf, mohon maaf.

Itu menyangkut dengan halaman 2 dan 3. Pak Amin, mohon maaf, saya lupa tadi. Kalau yang di nomor 1, halaman nomor 2 yang nomor 1, 2, 3, 4 itu, itu adalah RKP. Itu renstra kita sebenarnya itu, Pak Ikmal, ya?

SEKRETARIS MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (IKMAL LUKMAN):

Betul, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Ini renstra kita. Pak, renstra. Renstra. Kemudian di atas renstra itu ada arahan Bapak Presiden, contoh di 2021, renstra kita itu 858,5 triliun, target Bapak Presiden 900 triliun, kita realisasi *alhamdulillah* mencapai target. Kemudian renstra di 2022 itu 968,4 triliun, realisasinya 1.200, karena ada target dari Bapak Presiden, begitu pun selanjutnya.

Nah, sekarang kita, renstra kita 2024 itu sebesar 1.239,3 triliun, Pak, tapi dari targetnya itu menjadi 1.650 kalau 2024. Jadi, yang benar itu adalah lembaran nomor 3, Pak. Jadi, antara, ya nomor 3, jadi nomor 3 itu kalau yang biru, iya yang biru ya? Biru itu adalah target renstra. Oh hijau, hijau, hijau target renstra, biru seperti warna Nasdem itu realisasi, begitu. Begitu, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Yang tanya PKS, yang disebut Nasdem ini.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Kertasnya putih seperti warnanya PKS.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, baik, saya bacakan draf kesimpulan rapat kita pada hari ini.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi tahun 2023 yang mencapai 97,14% serta mendorong Kementerian Investasi untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024.

Oke ya?

Oke, Pak Menteri? Kasih apresiasi masa enggak mau, keren juga ini.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S dan seterusnya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B dan seterusnya tanggal 5 April 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp681.880.285.000,00, yang terdiri atas;
 - a. Program Penanaman Modal sebesar Rp322.394.354.000,00.
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp359.485.931.000,00.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebesar Rp889.320.857.000,00 yang akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal.

Oke, ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPRI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 5 hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Lain-lain nanti akan di perdalam.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Sebelum berakhir, *bikin* lagi satu kesimpulan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa itu?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Bahwa dengan anggaran 630, *eh*, 681 miliar, itu untuk target investasinya hanya 800 miliar. Jadi *gue* enggak setuju dengan RKP.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

800 T.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Enggak, tambah *dulu*, supaya jangan menteri besok dihajar.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

800 triliun.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):



800 miliar, *eh*, 800 triliun.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

800 triliun.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Iya, ditulis *dulu* pasal itu, karena itu akan menjadi dasar untuk kementerian besok kerja, supaya jangan sampai orang Papua bilang, "Tulis lain, baca lain, bikin lain".

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Kan bisa repot kita.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan, *tapi* itu kan belum dibahas, belum ada pendalaman tadi.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Tapi harus ditulis *dulu*, sebagai *baseline* kita dalam bekerja.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Kalau enggak, kalau enggak, kalau kurang nanti dari yang sebelumnya, biar tidak menjadi masalah, maksudnya. Mungkin KPI dari

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mungkin bisa dibahas dalam FGD, itu.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan, Bukan, nanti dicantumkan, dari paparan kementerian.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Eenggak, Pimpinan, mohon maaf, karena ini notulensi ini rujukan, nanti besok.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, Iya. Eenggak, dicantumkan dalam paparan Pak Menteri juga. Eenggak apa-apa.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Iya, di, ya ditambahkan lah kalau boleh, mohon maaf.

Makasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi dicantumkan, menerima penjelasan, Pak Menteri.

F-P.NASDEM (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.):

Menerima penjelasan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Mohon maaf, mohon maaf, kalau menerima penjelasan, bukan merupakan kesimpulan rapat.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Loh eenggak, ada juga.

WAKIL KETUA (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Di sini kan belum kesimpulan, Pak Menteri, ini *kan* baru pagu indikatif. *Kan* bisa berubah nanti di pagu anggaran.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):



Oh bisa berubah? Saya pikir.

WAKIL KETUA (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tapi kita menerima penjelasan bahwa dengan pagu indikatif.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebesar itu.

WAKIL KETUA (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebesar itu, maka Kementerian Investasi hanya akan menargetkan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

WAKIL KETUA (H.P.MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

800.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Oke, setuju.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, ya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

Setuju.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, tolong tambahkan ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):



Makasih, ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, Pak Menteri kalau mau ada *closing statement*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Sc.):

**Bapak-Ibu, Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,**

Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kajian kita bersama-sama, atas semua apa yang kami paparkan. Tapi lebih khusus kepada saudara saya, Pak Deddy, itu saya pikir mimpi kita semua, saya punya hati juga untuk itu. Itu akan menjadi *stressing* bagi kami, Pak, untuk melaporkan kepada pimpinan, untuk kiranya bisa ada ruang diskresi untuk *mengakomodir* apa yang menjadi saran Pak Deddy. Saya secara pribadi, Pak, kita punya hati sama, Pak, untuk hal itu saya sangat setuju kok, Pak.

Makasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, dengan demikian rapat ini bisa kita akhiri dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*, Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI secara resmi ditutup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.12 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

